

**GEOEKONOMI:
EKONOMI DAN PERTAHANAN**

Dr. Posma Sariguna Johnson Kennedy

Februari 2022



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	vi
RINGKASAN	ix
RENCANA PEMBELAJARAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II GEOEKONOMI.....	5
2.1 Konsep Geoekonom	5
2.2 Geoekonomi di Era Baru.....	8
BAB III EKONOMI DAN PERTAHANAN.....	11
3.1 Perekonomian dan Pertahanan	11
3.2 Definisi Keamanan dan Pertahanan	12
3.3 Ekonomi dan Pertahanan.....	14
3.4 Interaksi Perekonomian dan Keamanan (<i>Security</i>)	17
BAB IV ANCAMAN EKSTERNAL DARI LINGKUNGAN STRATEGIS	22
4.1 Ancaman Tradisional	22
4.2 <i>Balance of Power</i>	24
4.3 Situasi Mengancam	27

BAB V	PENGELUARAN PERTAHANAN DAN PEREKONOMIAN.....	33
5.1	Pengeluaran Pertahanan	33
5.2	Saluran-Saluran (<i>Channels</i>) yang Menghubungkan Pengeluaran Pertahanan dengan Perekonomian	34
5.3	Efek-Efek Pengeluaran Pertahanan terhadap Perekonomian.....	39
BAB VI	MOTIVASI NEGARA DALAM MENENTUKAN BESARAN ANGGARAN PERTAHANAN 45	
6.1	Tiga Hipotesis	45
6.2	<i>Fear Hypothesis</i>	46
6.3	<i>Ambition Hypothesis</i>	48
6.4	<i>Legitimation Hypothesis</i>	50
BAB VII	PERKEMBANGAN LINGKUNGAN GLOBAL.....	52
7.1	Pendahuluan	52
7.2	Perubahan Lingkungan Global.....	54
7.3	Perkembangan Global, Regional dan Nasional....	56
	a. Perkembangan Global	57
	b. Perkembangan Regional.....	57
	c. Kondisi Nasional	58
BAB VIII	ANCAMAN YANG DIHADAPI Indonesia.....	64
8.1	Hakikat Ancaman.....	64
	a. Pengertian Ancaman.....	64
	b. Perkiraan Ancaman	64

8.2 Ancaman Militer	65
a. Bentuk Ancaman Militer	68
b. Strategi Pertahanan Militer	70
8.3 Ancaman Non-Militer	73
a. Bentuk-bentuk Ancaman Non Militer	73
b. Pertahanan Non Militer dan Pembinaannya.....	77
c. Pembinaan Kekuatan Pertahanan Non-militer	79
BAB IX PENUTUP	82
9.1 Memperkecil Ancaman Eksternal	82
9.2 Anggaran Pertahanan	85
9.3 Penelitian yang Disarankan	87
REFERENSI.....	89



RINGKASAN

Hubungan ekonomi dan politik internasional antar negara di lingkungan strategis sangat dipengaruhi oleh kegiatan/kejadian-kejadian yang terjadi di kawasan. Perkembangan pandangan geoekonomi saat ini menunjukkan telah terjadi percampuran kembali antara kepentingan ekonomi dan keamanan yang sebelumnya sudah terlihat pemisahannya sejak berakhirnya perang dunia dan perang dingin.

Isu keamanan tradisional dimana banyak terjadi konflik antar negara, khususnya di perbatasan, kini kembali menonjol. Seperti yang berhubungan dengan geopolitik dan geostrategi. Pada masa adanya pengaruh kekuatan blok Barat dan blok Timur kekhawatiran dunia terutama adalah pada masalah pengembangan kekuatan militer dan senjata strategis serta hegemoni. Isu keamanan pada dekade terakhir ini makin kompleks dengan meningkatnya terorisme, perompakan dan pembajakan, penyelundupan, imigrasi gelap, penangkapan ikan secara ilegal, dan kejahatan lintas negara lainnya.

Perubahan politik dunia yang terjadi di era globalisasi, telah menghadirkan suatu kompetisi antar bangsa baik ekonomi maupun militer. Kondisi tersebut cenderung mengarah pada perebutan pengaruh yang cukup ketat, baik global, regional maupun nasional. Perkembangan tersebut antara lain

menyebabkan terjadinya perubahan pada situasi keamanan dunia dengan munculnya isu-isu keamanan baru.

Geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan Australia serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, menyebabkan kondisi nasional sangat dipengaruhi oleh kondisi strategis. Mencermati dinamika konteks strategis baik global, regional maupun domestik, maka ancaman yang sangat mungkin dihadapi Indonesia dapat berbentuk ancaman keamanan tradisional maupun ancaman keamanan non-tradisional.

BAB I

RENCANA PEMBELAJARAN

Deskripsi:

Pengajaran ini bertujuan untuk memberikan pendalaman mengenai ekonomi pertahanan berdasarkan pandangan ekonomi dalam menjaga stabilisasi pembentukan permintaan dan penawaran agregat di suatu negara. Diharapkan mahasiswa/pembaca dapat mengerti teori-teori yang diterapkan dalam kejadian/kegiatan/kehidupan nyata, yaitu strategi-strategi pertahanan, yang termasuk dalam bagian ilmu ekonomi pertahanan.

Capaian Pembelajaran Universitas/Fakultas/Prodi:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.

6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

Capaian Pembelajaran (*Learning Outcomes*) Mata Kuliah:

1. Mampu berpikir obyektif, kritis dan sistematis
2. Memiliki pemahaman konsep-konsep teoritis dalam ilmu-ilmu ekonomi, akuntansi, manajemen dan organisasi.
3. Kemampuan mengenali dan menganalisa permasalahan manajemen dan organisasi serta bisnis.
4. Memiliki kemampuan mengikuti dan menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Mampu memahami dan menjelaskan konsep-konsep mengenai ekonomi pertahanan.

Kemampuan Akhir yang Diharapkan:

1. Definisi, ruang lingkup ekonomi pertahanan dan keterkaitan dengan ilmu lain
2. Perkembangan ekonomi pertahanan: perkembangan global, perkembangan di Indonesia, dan peran ekonomi pertahanan.
3. Pengaruh pertahanan terhadap perekonomian, dan hubungan timbal baliknya.

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD RI 1945), dinyatakan bahwa setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan dari kekuasaan penjajah membentuk suatu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada alinea 4 UUD RI 1945 diamanatkan bahwa dengan adanya negara Indonesia, maka ada pemerintah yang memberikan perlindungan kepada segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, serta ikut serta mewujudkan ketertiban dunia.

Pemerintahan yang terbentuk akan dapat melaksanakan tugasnya hanya apabila negara atau kondisi nasional dalam keadaan aman, sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk mewujudkan keamanan nasional. Keamanan nasional diartikan sebagai kondisi atau keadaan yang bersifat nasional dan menggambarkan terbebasnya negara, masyarakat dan warga negara dari segala bentuk ancaman dan atau tindakan, baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Keamanan nasional juga bisa diartikan sebagai kebutuhan untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi negara melalui

kekuatan ekonomi, militer dan politik serta pengembangan diplomasi. (Sekretariat Jendral Dewan Ketahanan Nasional)

Perlindungan kepada segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia diartikan sebagai perlindungan keamanan kepada segenap warga negara dan wilayah Indonesia beserta seluruh sumber daya yang ada di dalamnya. Dalam konteks ini, “keamanan” dipandang sebagai sebuah produk, sehingga keamanan sesungguhnya adalah “milik” warga negara. Dengan kata lain, keamanan adalah barang publik (*public goods*) yang harus dapat dinikmati secara bersama-sama oleh seluruh warga masyarakat. Untuk itu negara harus mentransformasi aspirasi keamanan dari masyarakat menjadi sebuah produk yang bernama “keamanan”.

Selain keamanan (*security*), negara juga memproduksi kesejahteraan (*prosperity*), seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, perdagangan, dan lain sebagainya. Oleh karenanya keamanan sebagai wujud pelayanan publik (*public services*) tidak dapat berdiri sendiri dan terpisah dari kesejahteraan. Keamanan dan kesejahteraan adalah dua hal yang saling terkait. Permasalahan keamanan seringkali harus diatasi melalui upaya kesejahteraan, permasalahan kesejahteraan juga tidak jarang menjadi sumber gangguan keamanan.

Sampai dengan masa Perang Dunia II, definisi keamanan terkait erat dengan kekuatan militer. Agar negara aman, kemampuan militer yang kuat harus dimiliki, atau bersekutu dengan negara lain untuk menghadapi ancaman-ancaman tradisional. Setelah berakhirnya perang dingin definisi keamanan berkembang, selain merujuk pada ancaman tradisional juga merujuk pada ancaman-ancaman non tradisional

yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan, penyebaran penyakit, dan ancaman dari aktor-aktor non negara lainnya.

Globalisasi dan perdagangan bebas yang berlangsung di berbagai belahan dunia telah mempertajam persaingan antar bangsa dalam mempertahankan kepentingan ekonominya. Demikian pula persaingan antar negara-negara maju dalam bidang ekonomi telah memicu penguasaan sumber-sumber ekonomi di dunia, seperti energi, dan sumber daya alam lainnya. Kondisi ini juga telah menimbulkan keresahan internal khususnya akibat praktek perdagangan bebas negara antar kawasan yang memicu ketegangan hubungan, serta pertikaian kepentingan antar negara. Negara-negara yang lemah dalam sistem keamanan nasionalnya tentu akan menanggung risiko yang lebih besar.

Biaya pertahanan masih sangat dibutuhkan sebagai aktivitas yang penting sampai saat ini untuk melindungi sumber-sumber daya yang sangat besar dimana selalu berhadapan dengan kepentingan-kepentingan dan ketidakpastian. Perhatian pada aspek-aspek ekonomi menjadi sangat penting sehingga menjadikannya sebagai studi tersendiri. Kepentingan ini berlanjut dalam perkembangan bidang ekonomi dalam mengaplikasikan metoda-metoda ekonomi ke dalam masalah-masalah pertahanan.

Tujuan utama anggaran pertahanan adalah untuk memberikan rasa aman, yang secara simultan diharapkan memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian. Misalnya dengan menjamin keamanan terhadap investasi yang sangat mahal dan dalam jangka panjang. Agar keamanan lebih terjamin

demi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, dibutuhkan anggaran pertahanan yang cukup dan terjamin.

Pada buku ini akan dibahas mengenai segala aspek teori mengenai ancaman terutama yang berasal dari lingkungan strategis suatu negara atau ancaman eksternal dengan actor adalah negara. Topik ini merupakan bagian dari geoekonomi yang melihat suatu bangsa berada ditengah-tengah lingkungan internasionalnya yang berhadapan dengan ancaman, namun tetap harus bekerja dalam meningkatkan ekonominya sehingga perlu dijaga pertahanan dan keamannya.

2.1 Konsep Geoekonomi

Konsep geoekonomi saat ini menjadi semakin gencar dipakai dalam mendukung para akademisi dan pembuat kebijakan sebagai orientasi pemikiran. Namun, seperti yang diamati Mattlin dan Wigell, (2016), sangat mengejutkan banyak analis menggunakan istilah geoekonomi sebagai kata kunci tanpa mendefinisikannya dengan jelas, atau setidaknya mempertimbangkan bagaimana orang lain menggunakannya. Kamus Webster memberikan definisi dari geoekonomi sebagai berikut “Kombinasi faktor ekonomi dan geografis yang berkaitan dengan perdagangan internasional” (Merriam-Webster, 2022). Blackwill dan Harris (2016) dalam bukunya mendefinisikan "geoekonomi" sebagai: ”Penggunaan instrumen ekonomi untuk mempromosikan dan membela kepentingan nasional, dan untuk menghasilkan hasil geopolitik yang bermanfaat; dan dampak tindakan ekonomi negara lain terhadap tujuan geopolitik suatu negara”.

¹ Disarikan dari Posma Sariguna Johnson Kennedy, Yudi Sutrasna, Haetami. *Geo-ekonomi: Dampak Terbentuknya Pakta Trilateral AUKUS terhadap ASEAN*. *Journal of Business and Economics Research (JBE)* Vol 3, No 2, June 2022, pp. 108–116.

Definisi ini merupakan titik awal dalam membuat konsep geoekonomi. Contoh instrumen kebijakan ekonomi adalah kebijakan perdagangan dan investasi, sanksi, bantuan, bantuan pembangunan, kebijakan pendidikan tinggi, penelitian dan teknologi. Tindakan ekonomi oleh pemerintah dapat dianalisis melalui kerangka geoekonomi, setidaknya untuk mencapai tujuan strategi (non-ekonomi), atau ketika mereka mempengaruhi kepentingan geopolitik negara lain. Salah satu contohnya adalah ketika tarif dagang baru diterapkan di atas dasar keamanan nasional, bukan (murni) untuk perlindungan industri dalam negeri. Demikian pula, bantuan asing dapat dialokasikan ke negara tertentu dengan tujuan ganda: untuk membangun ekonomi serta untuk memperkuat sistem demokrasi dan membangun pengaruh terhadap negara tersebut. (Golley et al., 2016)

Istilah geoekonomi pertama kali diciptakan oleh ahli strategi AS Edward Luttwak pada tahun 1990, ketika khawatir bahwa Jepang akan menantang keunggulan globalnya dengan ekonomi daripada cara militer (Golley et al., 2016). Luttwak (1990) dalam artikelnya menggunakan istilah geoekonomi untuk menggambarkan sistem pasca Perang Dingin, merupakan arena persaingan utama antar negara yang mementingkan ekonomi daripada militer. Luttwak (1993) lebih lanjut mengelaborasi idenya dalam sebuah buku yang diterbitkan tiga tahun kemudian. Dengan berakhirnya ancaman Soviet ke Eropa dan Amerika Serikat, tidak dapat dibayangkan bakal terjadi perang besar atau konfrontasi militer dalam waktu dekat. (Scholvin dan Wigell, 2018)

Huntington (1993) juga mengamati, “Di dunia dimana konflik militer antara negara-negara besar tidak mungkin terjadi, kekuatan ekonomi akan semakin penting dalam menentukan keunggulan atau subordinasi negara”. Oleh karena itu, pandangan para ahli geoekonomi awal ini, akhir Perang Dingin tidak sama dengan 'akhir sejarah' yang diprediksi oleh Francis Fukuyama (Fukuyama, 2006). Sebaliknya, mereka meramalkan transformasi cara konflik yang dimainkan – “dengan modal sebagai pengganti senjata, inovasi sipil sebagai pengganti teknis militer, dan penetrasi pasar sebagai pengganti garnisun dan pangkalan” (Luttwak, 1990). Di era geoekonomi baru, negara-negara masih akan mengejar tujuan-tujuan nasionalnya tetapi melalui cara ekonomi dan bukan militer. (Scholvin dan Wigell, 2018)

Hirschman (1981) dalam *National Power and the Structure of Foreign Trade*, secara khusus mengakui saling ketergantungan ekonomi sebagai sumber kerentanan, setelah mempelajari tata negara ekonomi Nazi Jerman sebelum perang (Golley et al., 2016). Saling meningkatkan ekonomi ini menjadi meningkat pesat dalam skala internasional pada 1990-an, dan terlebih lagi pada 2000-an, begitu pula tantangan dan risikonya, banyak di antaranya bersifat geoekonomi. Sebagaimana dicatat, sering bersifat asimetris, artinya memerlukan sumber kekuatan dalam hubungan tawar-menawar, seperti yang ditunjukkan oleh Keohane & Nye (1977) dalam buku mereka. Risiko yang dihasilkan dari saling ketergantungan, dan yang mempengaruhi negara secara asimetris, termasuk gangguan pada rantai pasokan global dan perdagangan gelap serta penggunaan kerentanan asimetris sebagai strategi pengungkit (*World Economic Forum*,

2016). Kerentanan ini mendorong keamanan ekonomi menuju agenda global, dan menyarankan bahwa perhitungan geoekonomi harus menjadi yang terpenting dalam perhitungan strategi mereka antar negara baik negara besar ataupun kecil (Wigell, 2016). (Scholvin dan Wigell, 2018)

Apa yang sekarang disebut strategi geoekonomi seperti yang dilakukan oleh semua kekuatan besar di masa lalu, telah memberikan hasil positif bagi banyak negara yang telah memanfaatkan ekonomi dan keamanan dari strategi ini. Geoekonomi menyediakan "perangkat" yang dapat digunakan untuk menganalisis dan mengejar tujuan yang berbeda dari setiap negara. (Golley et al., 2016)

2.2 Geoekonomi di Era Baru

Era baru kini melihat lebih besar pada aspek keamanan, karena kemakmuran dan keamanan telah menjadi fungsi yang kompleks satu sama lain. Ini kontras dengan tiga dekade terakhir di bawah sistem internasional adalah unipolar, ketika bobot perhatian terhadap kemakmuran (misalnya, "lapangan kerja dan pertumbuhan") jauh lebih tinggi daripada keamanan (dalam persaingan antar negara di antara kekuatan besar). (Golley et al., 2016)

Kali ini berbeda. Perbedaannya adalah, ini kali pertama hegemon dunia Amerika Serikat secara bersamaan menghadapi persaingan ekonomi dan militer terhadap satu negara yang sama (China). Ini terjadi di tengah masa dimana teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan batasan baru yang memungkinkan bentuk-bentuk baru tata negara. Pergeseran dari

sistem internasional unipolar Kembali ke sistem multipolar menunjukkan bahwa akan terlihat lebih banyak konflik muncul. Perluasan fisik ke domain *cyber* berarti bahwa beberapa dari konflik itu akan mengambil bentuk yang sebelumnya tidak diketahui. Untuk alasan ini, kita akan melihat negara-negara bereksperimen dengan perangkat geoekonomi yang diperluas dalam beberapa tahun mendatang. (Golley et al., 2016)

Sementara itu, sebagian besar tulisan Luttwak masih sangat relevan saat ini. Dengan mengidentifikasi lima tren global baru yang bermanifestasi di perempatan politik, ekonomi, teknologi, dan masyarakat yang memunculkan tatanan baru ini (Golley et al., 2016):

1. Persaingan strategi antara Amerika dan China, dipicu oleh munculnya China sebagai kekuatan yang sangat besar, dimana model tatanan politik dan organisasinya sangat berbeda dengan Amerika Serikat.
2. Adanya kebijakan pemerintah domestik China dan strategi serta pengaruh internasionalnya, termasuk The Belt and Road Initiative -nya.
3. Perluasan masalah keamanan nasional yang mencakup banyak domain, termasuk dalam perdagangan dan investasi internasional.
4. Melemahnya tatanan berbasis aturan yang muncul di bawah kepemimpinan Amerika pada periode pasca-perang, baik karena tantangan yang ditimbulkan oleh China dan negara-negara non-Barat lainnya, maupun tantangan dari legitimasi di mata publik Barat.
5. Tingkat saling ketergantungan global yang sangat tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk arus

manusia, pengetahuan, barang dan modal, serta konektivitas di ruang siber.

Beijing dan Washington, serta ibu kota lainnya, kini terlibat dalam persaingan kekuatan besar yang kompetitif. Selama beberapa dekade proses globalisasi dengan situasi institusi global yang mendorong saling ketergantungan ekonomi. Ini dianggap sebagai pendorong perdamaian dan kemakmuran, setidaknya di dunia kapitalis. Saling meningkatkan ekonomi ini dilihat oleh analis keamanan sebagai sumber kerentanan dan ketidakamanan. (Golley et al., 2016)

3.1 Perekonomian dan Pertahanan

Tujuan dari suatu negara adalah memaksimalkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka kesejahteraan sosial diharapkan akan terus meningkat. Agar dapat memberikan kesejahteraan sosial maka pembangunan haruslah mengarah pada bagaimana terciptanya rasa aman dan nyaman diantara para individu maupun kelompok dalam menjalankan kegiatannya, sehingga mereka dapat meningkatkan utilitasnya secara maksimal. Untuk menciptakan rasa aman maka perlu pertahanan untuk mengeliminir ancaman yang dihadapi suatu negara. Membangun pertahanan membutuhkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah melalui anggaran pertahanan.

Menurut Adam Smith tugas melindungi masyarakat perlu dilakukan oleh kekuatan pertahanan yang merupakan kewajiban pertama dari negara, selain menyelenggarakan peradilan, dan melaksanakan pekerjaan umum. Perlindungan dari pemerintah yang baik akan berperan dalam mengharmonisasi konflik antara kepentingan swasta dan sosial, pencegahan terhadap eksploitasi oleh asing, dan merangsang peningkatan investasi yang produktif. Keamanan ini ditransformasikan menjadi barang publik yang wajib disiapkan oleh negara secara impersonal dan

tak dapat di-*private*-kan atau dibiarkan dikelola sendiri oleh masyarakat, dan merupakan hak setiap warga negara untuk menikmatinya.

3.2 Definisi Keamanan dan Pertahanan

Setiap orang tidak akan memiliki rasa aman bila mereka merasakan adanya hal-hal yang selalu mengancam ketenangan dan keselamatan hidupnya. Demikian pula suatu bangsa atau negara akan merasa tidak aman bila eksistensi hidupnya selalu berada dalam ancaman bahaya. Ancaman tersebut bisa datang dari luar maupun dari dalam dirinya. Dari sudut epistemologi keamanan berasal istilah Latin “*se*” dan “*curus*” yang bermakna terbebas dari bahaya atau terbebas dari ketakutan. Dengan demikian keamanan dapat dirumuskan sebagai sebuah situasi tanpa resiko atau situasi tanpa ancaman.

Keamanan merupakan fungsi klasik negara di samping fungsi kemakmuran, dimana bangunan masyarakat ideal salah satunya adalah adanya keamanan. Menghindarkan masyarakat dari ancaman yang datang dari luar merupakan fungsi utama negara dalam pemahaman yang klasik. Dalam konsep-konsep tradisional, keamanan merupakan kondisi tidak adanya ancaman fisik (militer) yang berasal dari luar, atau merupakan suasana bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan. Anggoro (2003) menyebutkan tiga ciri penting dari pengertian tradisional itu, adalah: pertama, identifikasi “nasional” sebagai “negara”; kedua, ancaman diasumsikan dari luar wilayah negara; ketiga, penggunaan kekuatan militer untuk menghadapi ancaman-ancaman. Secara tradisional masalah

utama yang dihadapi setiap negara adalah membangun kekuatan untuk menangkal (*to deter*) atau mengalahkan (*to defeat*) suatu serangan.

Dalam rumusan yang lebih bersifat umum, Busan (1991) menyatakan keamanan dipahami sebagai persoalan yang berkaitan dengan nasib manusia sebagai kolektivitas. Keamanan mencakup *survival* dan terpenuhinya serangkaian kondisi yang diperlukan bagi eksistensi kolektivitas manusia membebaskan diri dari ancaman. Keamanan bergerak dalam lima ranah penting, yaitu militer, politik, ekonomi, masyarakat dan lingkungan. Karenanya, keamanan dicapai hanya jika kolektivitas yang bersangkutan dari sudut militer, ekonomi dan teknologi sudah maju; dari sudut politik stabil; dan dari sudut sosio-ekonomi telah dicapai kohesifitas dalam kolektivitas.

Setiap variasi ancaman dapat direduksi atau bahkan diabaikan melalui pengembangan mekanisme peringatan dini yang baik. Karenanya, kebutuhan untuk mengetahui ancaman dan pencegahannya merupakan konsep yang sama penting dalam keamanan. Dalam konsep *preventive defense* diperlukan strategi pertahanan yang mengkonsentrasikan keamanan nasional dari berbagai macam potensi ancaman betapapun kecilnya. Bila tidak dikelola dengan tepat maka ancaman tersebut akan menjadi bahaya yang secara nyata akan mengancam secara langsung eksistensi dan kelangsungan hidup suatu bangsa atau negara.

McGuire dalam Hartley & Sandler (1995) memberi batasan makna pertahanan, yaitu “seluruh kegiatan agresif dan protektif yang dilakukan pemerintah dan bangsa-bangsa untuk menentukan (*to define*), meningkatkan (*to advance*), dan

melestarikan (*to preserve*) kepentingannya diantara bangsa-bangsa lain. Tentu saja seluruh kegiatan agresif dan protektif itu dilakukan pemerintah dan bangsa atas nama negara. Dengan demikian pertahanan pertama-tama dan terutama hadir karena kehadiran negara. Tanpa kehadiran negara akan muncul kesulitan sangat serius bagi bangsa untuk menentukan, memajukan, dan melestarikan kepentingan nasional masing-masing (Keliat, 2010).

Joewono Soedarsono, Menteri Pertahanan Republik Indonesia 2004-2009, menyatakan bahwa persoalan pertahanan negara pada dasarnya memiliki ruang cakupan yang luas. Di satu sisi pertahanan dalam arti sempit menyangkut kekuatan militer, dan di sisi lain, pertahanan secara luas menyangkut berbagai aspek kehidupan negara, termasuk ekonomi. William Liddle dalam Bakrie (209) menyebutkan terdapat dua unsur fisik mendasar di dalam membangun kekuatan bangsa, yaitu ekonomi dan militer. Keduanya melihat lemahnya ekonomi bangsa sebagai bentuk pertahanan dalam arti luas, dan terbatasnya kemampuan militer sebagai bentuk pertahanan dalam artian sempit, yang memang merupakan kelemahan nyata bangsa.

3.3 Ekonomi dan Pertahanan

Terdapat perbedaan konsep yang menonjol antara pertahanan dan ekonomi. Perbedaan utama terletak pada watak dari kedua konsep tersebut yaitu, ekonomi mengutamakan “kedaulatan terletak pada kebutuhan manusia yang tidak terbatas”, sedangkan watak pertahanan adalah “kedaulatan ada di tangan negara”. Hal ini memberikan suatu konsekuensi: “Jika

disepakati untuk menghilangkan kegiatan ekonomi berarti menegaskan hakikat manusia, dan jika menghilangkan kegiatan pertahanan berarti menafikan kehadiran negara”. Karena itu perlu menghubungkan kedua watak yang berbeda itu sehingga keduanya berhubungan erat dan saling melengkapi.

Keliat (2010) menambahkan keterkaitan itu dalam beberapa cara, yaitu:

1. Negara hadir untuk melindungi kepentingan pelaku ekonomi nasional. Kegiatan ekonomi tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada jaminan terhadap perlindungan hak kepemilikan. Walaupun perang tidak selalu terjadi, kemungkinan untuk itu selalu ada dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini perang merupakan salah satu jenis ancaman terhadap hak kepemilikan. Pertahanan merupakan biaya ekonomi yang dikeluarkan untuk memperkecil ketidakpastian di masa depan.
2. Negara membutuhkan sumber daya ekonomi untuk melindungi keutuhan teritorialitasnya. Suatu negara disebut berdaulat dan modern jika ia menduduki suatu ruang geografis dengan garis batas secara jelas yang memisahkan dirinya dengan pihak lain. Pada wilayah dalam garis batas itu negara memiliki otoritas yang sah. Namun otoritas ini bukan sesuatu yang abadi, selalu terdapat ancaman terhadap garis batas itu.
3. Pengorganisasian tentara sebagai profesi yang berhubungan dengan kekerasan terkait dengan surplus ekonomi yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi masyarakat. Diamond (1999) menyatakan bahwa tentara hanya akan terorganisasi dengan baik jika kegiatan

ekonomi masyarakat mampu menghasilkan surplus ekonomi. Tentara bukan manusia “produktif” dan tidak bertujuan untuk memproduksi secara langsung dan secara aktif sebagai pelaku ekonomi nasional. Sumber daya ekonomi yang tersedia merupakan faktor sangat penting bagi tentara untuk melaksanakan fungsinya secara efektif. Di sini mulai terjadi pertimbangan opportunity cost sebagai logika ekonomi apakah perlu pemeliharaan pasukan tentara yang terorganisasi secara permanen.

Jika pertahanan dan perekonomian memiliki keterkaitan, ada dua cara pandang yang berbeda untuk konsep ini, yaitu: kebutuhan peningkatan anggaran pertahanan itu sebagai masalah ekonomi (*economic problem*); atau kebutuhan peningkatan anggaran sebagai masalah keamanan (*security problem*). Berdasarkan fakta bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas tetapi sumber daya untuk mendukung kebutuhan tersebut terbatas, maka ekonomi pertahanan merupakan kajian tentang efek-efek kelangkaan sumber daya terhadap pencapaian tujuan-tujuan pertahanan, baik untuk tujuan protektif (perlindungan) maupun agresif (penyerangan). Tujuan-tujuan pertahanan tidak bisa ditetapkan tanpa batasan, harus diberi pembatasan melalui pilihan-pilihan kebijakan paling rasional dan optimal, jika dilihat dari sumber daya yang tersedia. (Keliat, 2010).

3.4 Interaksi Perekonomian dan Keamanan (*Security*)

Negara perlu keamanan dalam menjalankan segala kebijakannya, sehingga harus membeli “*security*”-nya melalui penyediaan berbagai fasilitas pertahanan agar tidak terancam dari negara lain. Namun di banyak model optimasi perekonomian, *output* akibat ancaman (*threat*) dan hubungan pengeluaran pertahanan terhadap *output* kadang seringkali diabaikan. Berbasiskan jurnal penelitian dari Smith (2000) berikut ini dipaparkan hubungan antara keamanan dan perekonomian.

Secara sederhana hubungan dalam perekonomian dengan berbagai variabel serta anggaran pertahanan dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y_t = E(M_t, X_t)$$

(1)

Dimana X_t adalah berbagai determinan perekonomian seperti tabungan, teknologi, dan lainnya, sedangkan M_t adalah anggaran pertahanan. Diasumsikan pengaruh dari M kepada Y adalah negatif, karena adanya persaingan dengan anggaran kesejahteraan. Untuk mengubah pandangan tersebut, maka ke dalam hubungan tersebut ditambahkan *security* (S). Hal ini dapat dipresentasikan dengan fungsi permintaan akan pengeluaran militer. Pemerintah menentukan pengeluaran militernya secara optimal dengan adanya kendala biaya dan acaman permusuhan

(*hostile threats*, H) dari musuh. Gambaran tersebut dapat dituliskan dalam fungsi anggaran militer sebagai berikut:

$$M_t = S(Y_t, H_t)$$

(2)

Pengaruh Y terhadap M diasumsikan positif, dimana negara yang lebih kaya dapat mengeluarkan lebih banyak dana untuk anggaran militernya. Besaran dari efek H pada M akan bergantung pada efektivitas dari persiapan militer dalam menghadapi ancaman negaranya. Dimensi ekonomi dan keamanan memberikan dua hubungan antara Y dan M yang akan digambarkan pada grafik di bawah ini (untuk X dan H yang tetap). Terlihat dari kedua model, pertumbuhan dan pengeluaran militer adalah *endogenous*. Ekuilibrium perpotongan antara dua kurva diberikan seperti berikut ini:

$$Y_t = Y(X_t, H_t)$$

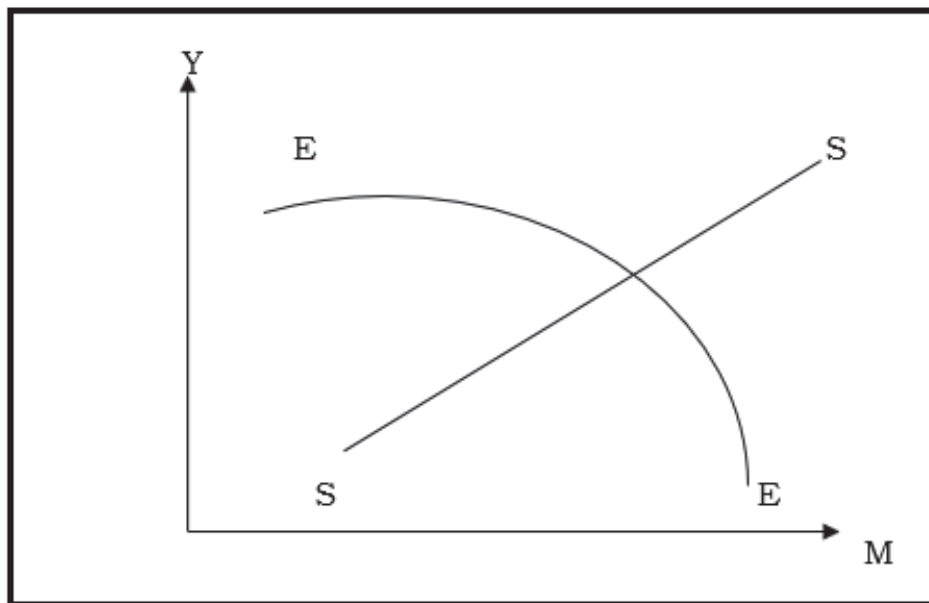
(3)

$$M_t = M(X_t, H_t)$$

(4)

Jika H dan X adalah independen, hubungan antara Y dan M akanlah memberikan hasil positif jika variansi dari X relatif lebih besar dari pada variansi dari H . Akan terjadi hubungan negatif jika terjadi kasus yang sebaliknya. Hal ini mirip dengan perilaku penawaran dan permintaan.

Jika terdapat banyak *shocks* pada kurva penawaran tetapi tidak pada kurva permintaan, maka pergerakan *supply shocks* akan menggeser titik pada kurva permintaan yang konstan. Sebaliknya jika terdapat banyak *shocks* pada kurva permintaan tetapi tidak pada kurva penawaran, maka pergerakan *demand shocks* akan menggeser titik pada kurva penawaran yang konstan.



Gambar 1. Dimensi Ekonomi (E) dan *Security* (S)
Sumber: Smith (2000)

Secara kualitatif dapat dijelaskan terdapat empat kemungkinan kombinasi dari tingkat pertumbuhan dan proporsi pengeluaran militer terhadap *output* yang dijelaskan oleh Smith (2000) berikut ini:

1. Kasus pertama, adalah adanya pengeluaran militer yang rendah dan pertumbuhan yang tinggi. Contoh kasus ini adalah, setelah Perang Dunia II, Jerman dan Jepang secara

relatif menghadapi ancaman yang sangat rendah karena jaminan keamanan dari Amerika Serikat, sehingga mereka memiliki proporsi pengeluaran militer yang rendah. Hal ini berperan penting dalam peningkatan investasi, dimana terdapat kondisi yang meningkatkan pertumbuhan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi yang tinggi dan tingkat pertumbuhan yang tinggi.

2. Kasus kedua, adanya pengeluaran militer yang tinggi dan pertumbuhan yang tinggi. Contoh kasus ini adalah, sejak tahun 1950, Taiwan dan Korea Selatan menghadapi tingkat ancaman yang tinggi dari China dan Korea Utara, sehingga mereka memberikan proporsi yang besar dari GDP-nya untuk militer. Akan tetapi keduanya tetap memiliki kondisi yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan investasi yang tinggi pada modal-modal fisik dan sumber daya manusia serta memiliki potensi besar dalam menangkap transfer teknologi, sehingga meng-offset efek depresi dari pengeluaran militer.
3. Kasus ketiga, rendahnya pengeluaran militer dan rendahnya pertumbuhan. Contoh kasus ini adalah, setelah kolonisasi berakhir, negara-negara di sub-Saharan Africa menghadapi banyak ancaman yang sebagian besar berasal dari internal. Akan tetapi pengeluaran militer yang dilakukan relatif tidak efektif dalam menghadapi ancaman-ancaman tersebut. Negara-negara ini memiliki kondisi lingkungan yang menghambat pertumbuhan seperti peperangan, pemerintahan yang tidak berfungsi baik, dan sebagainya, sehingga tidak mampu mengejar ketertinggalan.

4. Kasus keempat, pengeluaran militer yang tinggi dan pertumbuhan yang rendah. Contoh kasus ini adalah setelah Perang Dunia II, Uni Soviet merasa ancamannya meningkat, tergambar dari pengeluaran militernya dalam menghadapi hegemoni Amerika Serikat, sehingga membagi proporsi besar dari output untuk militer. Timbulnya efek depresi, kondisi ekonominya tidaklah meningkat karena tingginya kontribusi untuk militer menyebabkan sistem negara tersebut menjadi runtuh.

Smith (2000) menyatakan, walaupun banyak faktor-faktor lain perlu ditambahkan ke dalam kombinasi sederhana ini, namun kasus-kasus ini mengindikasikan terdapat kombinasi antara perekonomian dan pengeluaran militer. Namun sesuai dengan teori ekonomi yang menjelaskan sistem sosial yang kompleks, suatu kasus tidaklah dapat dijelaskan dengan satu hubungan sederhana atau model empiris yang sangat biasa. Akan tetapi dipercaya terdapat hubungan antara pengeluaran pertahanan dengan pertumbuhan, walaupun dengan kemungkinan terdapat pengaruh negatif yang kecil dalam jangka panjang.

4.1 Ancaman Tradisional

Schelling (1960) merupakan salah satu peneliti mula-mula yang menganalisa bagaimana suatu negara melakukan pencegahan (*deterrence*) terhadap ancaman dari kekuatan lawan. Schelling menjelaskan "... adalah penting mempengaruhi pilihan-pilihan pihak lain yang akan diambil....dengan mempengaruhi ekspektasinya dari bagaimana kita berperilaku. Hal ini melibatkan konfrontasi dengannya dimana dipercaya perilaku kita menentukan perilakunya" (dalam McGuire, 1995). Sebelum berkembangnya *game theory* pada semua level ekonomi, para ekonom sudah memperkenalkan konsep pencegahan ancaman (*deterrent threat*) berdasarkan insentif yang akan diterima di masa datang.

Pada awalnya ancaman selalu ditekankan pada "negara". Negara menjadi target dari ancaman sehingga keamanan negara menjadi pemikiran awal dalam memahami keamanan. Fungsi keamanan lebih diberikan pada usaha untuk melindungi negara. Hal ini terlihat dari fungsi masing-masing institusi keamanan, yaitu tentara, polisi dan intelijen yang memberikan penekanan pada keamanan negara.

Dalam perkembangan lebih kini, spektrum “ancaman terhadap” diperluas hingga menjangkau, tapi tidak terbatas, keamanan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok/kolektivitas. Perluasan konsep ini tampak dari rumusan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengharuskan konsep “keamanan terhadap” diubah dari “penekanan pada keamanan nasional” ke arah penekanan yang lebih besar pada “*people security*”. Pencapaiannya pun mengalami pergeseran tekanan, dari keamanan yang dicapai melalui “*armament*” ke arah keamanan yang diwujudkan melalui “*human development*”; dari penekanan pada keamanan “*territorial*” ke arah “*food, employment and environmental security*”.

Jika meninjau dari jenis/bentuknya ancaman terdiri dari militer dan non militer, sedangkan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi ancaman tradisional/konvensional dan non tradisional/non konvensional. Pemahaman tradisional selalu mengidentifikasi ancaman dari lingkungan eksternal terhadap negara pesaing dengan melihat kapabilitas militernya. Dan karenanya, harus direspons dengan kekuatan militer pula. Pandangan non tradisional memberikan tekanan pada aktor non-negara sebagai sumber ancaman – yang dapat bersifat domestik ataupun transnasional yang dimunculkan dalam ancaman non-militer (misalnya, ekonomi, politik domestik, lingkungan hidup, terorisme, penyakit menular, dan narkoba).

Tingkat ancaman dalam penelitian ini difokuskan pada ancaman tradisional, dimana aktor atau pelakunya adalah negara-negara. Walaupun Indonesia tidaklah memiliki musuh tradisional dan ancaman non-tradisional/internal juga merupakan hal yang penting, namun ketidakwaspadaan atau

lengah terhadap ancaman tradisional/eksternal dapat sangat membahayakan. Bahkan pertahanan yang lemah bisa menjadi pintu masuk terjadinya konflik-konflik internal akibat pengaruh asing. Dengan lemahnya pertahanan akan berakibat juga terhadap berkurangnya wibawa negara di percaturan internasional, diplomasi-diplomasi yang dilakukan untuk kepentingan negara juga tidak memiliki daya tekan yang kuat. Selain itu dominasi, pelanggaran, infiltrasi asing dan lain-lain dengan mudah masuk ke dalam negara karena lemahnya daya gentar. Untuk menghadapi ancaman itu semua, negara tidak boleh berharap dari bantuan negara lain, tetapi harus berdasar pada kekuatan sendiri, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pengeluaran pertahanan.

4.2 *Balance of Power*

Besaran ancaman sangat sensitif dengan keberadaan kekuatan dari setiap negara relatif dengan kekuatan negara tetangga-tetangganya. Besaran ini mengasumsikan semakin besar kapabilitas relatif suatu negara (*nation's relative capability*), semakin besar pula pengaruh politik dan militernya terhadap lingkungan strategisnya. Distribusi kapabilitas ini asimetrik diantara negara-negara sehingga membentuk ancaman dan tekanan di antara mereka.

Chatterjee (1972) menjelaskan, secara klasik keseimbangan distribusi kekuatan ini atau *balance of power* sangat dipengaruhi paling besar oleh kekuatan militer suatu negara baik jumlah tentara, jumlah persenjataan maupun teknologi yang tercermin pada anggaran militernya. Akan tetapi

Virmani (2004) menyatakan bahwa semenjak selesainya Perang Dunia II, dunia berubah secara dramatis, sehingga konsep “*balance of power*” secara gradual berubah menjadi “*natural balance of power*” dimana besaran ekonomi menjadi dasarnya. *Balance of power* ini juga akan disebut “*stable balance*” jika menunjukkan *natural balance*.

Virmani (2004) menjelaskan bahwa *natural balance of power* ini merupakan cita-cita perdamaian bangsa di dunia yang hingga kini masih terus akan diusahakan perwujudannya. *Natural balance of power* didefinisikan sebagai sikap bertanggung jawab suatu negara dalam meningkatkan kekuatan potensial relatifnya secara proporsional dengan memperhatikan internasionalisasi dan hak-hak global. Sistem yang dibangun diharapkan mampu menciptakan kompetisi ekonomi yang damai antar negara. Di dalam negaranya sendiri tidak terjadi kompetisi antar dimensi, baik ekonomi dan militer. Kondisi stabil dalam *natural balance of power* akan terwujud jika:

1. Kekuatan militer relatif adalah proporsional dengan kekuatan ekonomi. Postur militer dibentuk dalam besaran yang rasional dan terlegitimasi.
2. Pembangunan militer yang agresif dapat diidentifikasi dan secara serta merta diisolasi oleh sistem internasional/global sebelum ada korban-korban yang berjatuh akibat agresivitas tersebut.
3. Perubahan dalam kekuatan ekonomi relatif berhubungan langsung dengan kedudukan suatu negara dalam hubungan internasional. Yang terkuat adalah yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar.

4. Hubungan kerjasama internasional dalam bidang ekonomi sangat intensif yang meningkatkan kekuatan kolektif sehingga meningkatkan biaya bagi suatu negara jika ingin melakukan agresifitas.

Treverton & Jones (2005) menjelaskan dalam menghitung kekuatan nasional adalah dengan menghitung total sumber-sumber daya nasional. Kontainer-kontainer kapabilitas² (*capability containers*) negara tersebut ditransformasi atau dikonversi melalui proses-proses tingkat negara menjadi kekuatan yang dapat digunakan. Proses-proses aktual dalam kerangka kerja ini difokuskan pada faktor-faktor yang sangat kritis. Faktor-faktor tersebut itulah yang membentuk kekuatan nasional.

Konsep ini sebenarnya memiliki beberapa kelemahan. Pertama, pada kenyataannya penyesuaian kekuatan itu tidak berjalan otomatis, tetapi tergantung pada kemampuan para aktor atau negarawan untuk melihat dan manafsirkannya secara tepat. Kedua, dalam kasus-kasus spesifik sangat sulit mengetahui apakah perubahan-perubahan dalam sumber daya itu dipengaruhi para aktor atau tidak. Ketiga, model ini tidak memperhitungkan tujuan dan motivasi negara-negara tersebut, karena tidak semua negara menggunakan pengaruhnya untuk terus melakukan peningkatan sumber daya dan kekuatan demi memperoleh pengaruh dalam politik internasional. (Hopkins & Mansbach, 1973)

² Sumber-sumber daya ini dihitung dengan bobot tertentu sehingga membentuk suatu kekuatan nasional.

4.3 Situasi Mengancam

Lebovic & Ishaq (1987) mendefinisikan situasi mengancam adalah terjadinya distribusi kekuatan yang asimetris antar negara yang menciptakan suatu kondisi mengancam (*threat*) dan ketegangan (*tension*) atau eskalasi diantara mereka. Dengan demikian situasi mengancam ini dapat diekspresikan sebagai konsep kekuatan relatif. Namun bentuk asimetris kekuatan ini dilihat dari sudut pandang berbeda-beda tergantung motif apa yang melandasi kondisi ini. Dari persepsi ini maka suatu negara membuat kebijakan pengeluaran pertahanan mereka.

Komitmen yang jelas antar negara dapat memberikan ketidakmungkinan terjadinya perang jika distribusi kekuatannya tetap, maupun saat terjadi perubahan distribusi kekuatan. Namun informasi yang tidak simetris dapat memberikan kemungkinan terjadinya perang sekalipun tidak terjadi perubahan distribusi kekuatan. Perkembangan teknologi berpengaruh penting dalam pembentukan perilaku suatu negara berdasar pada perhitungan manfaat dan biaya. Jika biaya berperang sangat mahal maka akan memperendah risiko, tetapi jika suatu negara merasa manfaatnya lebih besar maka risiko terjadinya perang akan lebih tinggi.

Powell (1999) memberikan pandangannya sendiri, bahwa setiap negara memiliki *shadow power* masing-masing dalam pertahanannya. *Shadow power* ini akan mempengaruhi perilaku dari setiap negara, khususnya bagaimana negara-negara tersebut mengatasi perubahan distribusi kekuatan di antara mereka, bagaimana suatu negara bereaksi ketika mereka terancam, dan

bagaimana perubahan teknologi dalam militer mempengaruhi harapan perdamaian.

Powell percaya sehubungan dengan *shadow power* ini akan membentuk pola perilaku dari negara-negara menghadapi ancamannya (*threats*) dalam tiga respon, yaitu meningkatkan kekuatan internalnya (*internal balancing*), tawar menawar dan kompromi (*bargaining and compromises*), dan bekerja sama/bersekutu (*allying*) dengan yang lainnya. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi respon-respon dari negara tersebut, yaitu masalah komitmen (*commitment problem*), informasi yang tidak simetris (*asymmetric information*), dan perkembangan teknologi (*shift in technology coercion*).

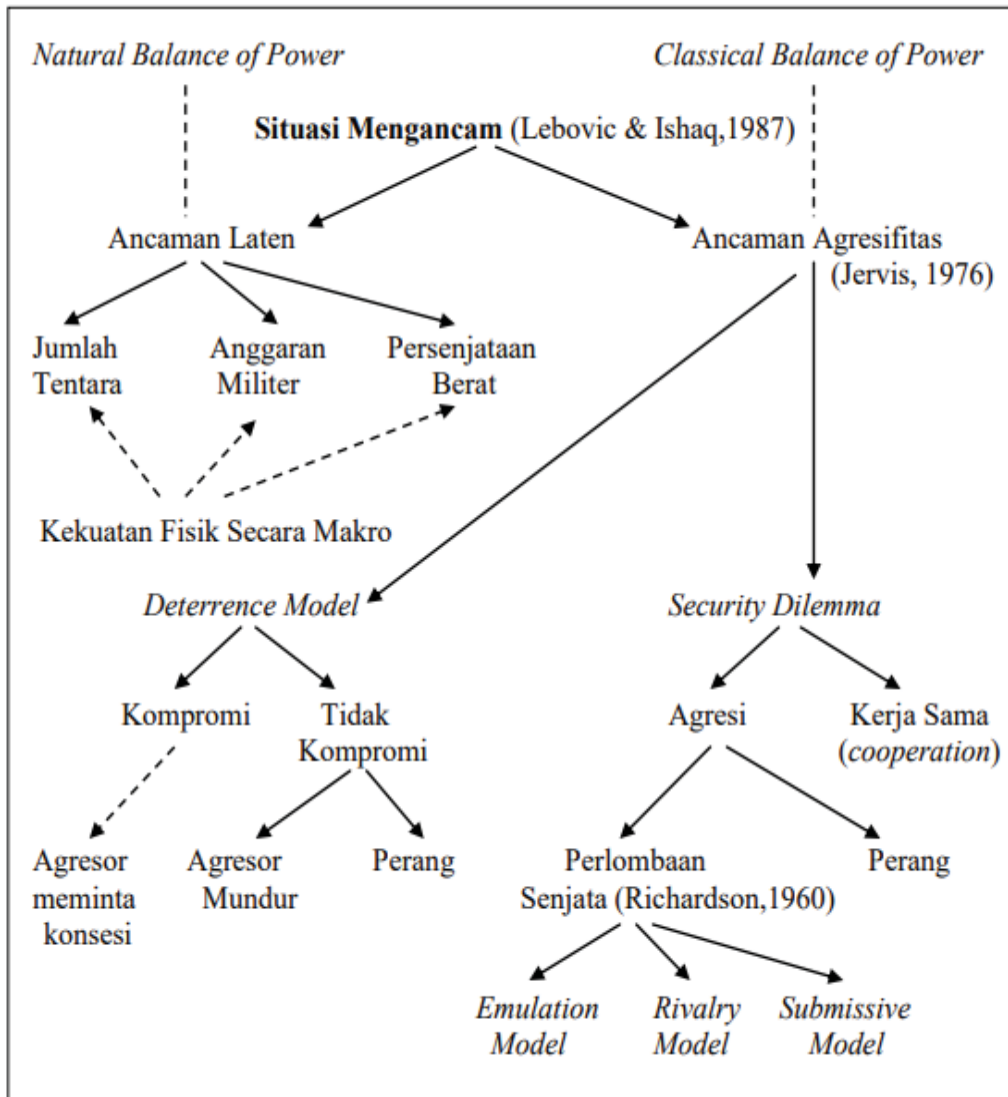
Lebovic & Ishaq membagi menjadi dua kondisi bagaimana negara bertindak dalam menghadapi ancaman sesuai dengan keadaan lingkungan strategis mereka, yaitu:

1. Suatu negara akan berusaha memiliki kapabilitas militer yang tinggi secara agresif tanpa melihat proporsi kekuatan negara lain. Dalam menghadapi ancaman, negara tersebut membuat dirinya sebagai yang terkuat di kawasannya.
2. Ancaman diperlakukan sebagai laten dibanding sebagai ancaman aktif. Ancaman dipersepsikan sebagai tekanan. Ketika persepsi tekanan dan tegangan politik mengalami perubahan, akan berpengaruh terhadap tingkat pengeluaran militernya. Negara ini juga lebih menekankan pada kekuatan fundamental yang menyebabkan pandangan terhadap ancaman lebih implisit daripada eksplisit. Ancaman fundamental lebih dilihat dari keamanan nasional secara potensial yang berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan pertahannya.

Jervis (1976) dalam Yetgin (2003) membuat dua asumsi kondisi tindakan negara dalam menghadapi ancaman sesuai dengan keadaan lingkungan strategis mereka, yaitu model *deterrence* dan model spiral atau *security dilemma*. Berikut pengertian dari kedua model tersebut:

1. *Deterrence model* menjelaskan motif di belakang perilaku suatu negara yang menunjukkan kebijakan agresif untuk mengamankan kepentingan nasionalnya. Teori ini juga menggambarkan perlunya tindakan yang harus dilakukan untuk menjaga lawan masih dalam kontrolnya. Negara tersebut akan mencoba melakukan aksi untuk melihat reaksi lawan. Jika *aggressor* merasa bahwa lawan berperilaku kompromi, merupakan keuntungan baginya dan mengambil manfaat dari lawan. Agresor akan meminta konsensi lanjutan untuk mempertahankan ambisinya. Jika terjadi sebaliknya, ternyata lawan memiliki kekuatan di luar perkiraannya sehingga probabilitas kemenangannya kecil, menjadikan *aggressor* menghentikan tindakannya. Bahkan tidak menutup kemungkinan terjadinya peperangan antar kedua belah pihak.
2. *Spiral model* atau *security dilemma* menjelaskan ketika suatu negara (atau negara pertama) ingin meningkatkan keamanannya sendiri, dengan meningkatkan kemampuan pertahanannya. Ketika suatu negara meningkatkan kemampuan dalam mempertahankan negaranya, justru meningkatkan ancaman kepada negara kedua atau negara-negara lain di sekitarnya. Hal ini memberikan persepsi bagi negara kedua akan ancaman agresi, sehingga mereka

ikut meningkatkan pertahanannya untuk menjaga jika terjadi penyerangan. Negara pertama melihat ini bereaksi dengan lebih meningkatkan kekuatannya karena merasa negara kedua menjadi lebih mengancam. Kondisi ini menciptakan efek spiral karena setiap negara akan saling merasa terancam terhadap negara lain akibat meningkatkan pertahanannya sendiri. Mereka akan bersiap menghadapi skenario terburuk dalam mempertahankan negaranya ketika ancaman meningkat. Hal ini dapat memicu perlombaan senjata bahkan peperangan. Model spiral ini disebut juga *security dilemma*. Untuk menghadapi ini sebaiknya negara membangun kerjasama, kepercayaan, dan institusi dalam lingkungan strategisnya. Model ini mengkritik model *deterrence* karena saat ini hampir tidak ada negara yang anarkis.



Sumber: telah diolah kembali dari berbagai sumber
 Gambar 2. Diagram Situasi Mengancam yang Dihadapi Suatu Negara

Dalam hal perlombaan senjata (*arm races*) beberapa peneliti membaginya dalam berbagai kategori. Yang paling sering digunakan adalah yang dibangun oleh Lewis F. Richardson (1960) dengan membagi perlombaan senjata dalam tiga varian, yaitu:

1. *Emulation Model*. Pada model ini setiap negara bereaksi terhadap perbedaan tingkat pengeluaran militer lawan dalam usaha mencapai keseimbangan.
2. *Rivalry Model*. Pada model ini, kedua negara bereaksi dengan kekuatan yang lebih agresif. Model ini juga dianalisa oleh Sandler & Hartley (1995). Sandler & Hartley (1995) mencatat bahwa model ini hampir tidak pernah digunakan dalam uji empiris.
3. *Submissive Model*. Pada model ini, negara yang memiliki kekuatan lebih kecil bereaksi lebih kecil daripada negara yang memiliki kekuatan lebih besar, sehingga *gap* pengeluaran pertahanan menjadi semakin besar.

Dari semua model yang telah dipaparkan di atas, dianalisa mana situasi paling cocok yang dihadapi suatu negara dalam lingkungan strategis internasionalnya. Situasi yang dihadapi suatu negara akan tercermin dari kebijakan anggaran militer dalam membangun kekuatan pertahanannya.

5.1 Pengeluaran Pertahanan

Pengembangan kekuatan militer selalu dihadapkan pada masalah keterbatasan sumber daya, termasuk sumber dana nasional. Keberadaan kekuatan militer untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan selalu berhadapan dengan pilihan prioritas kebijakan nasional yang lain. Penguatan kekuatan militer sebagai komponen utama pertahanan adalah melalui langkah-langkah mobilisasi, ekspansi atau perluasan kekuatan militer dan peningkatan kemampuan tanggap. Modal penting dalam pengembangan semua itu adalah anggaran pertahanan.

Anggaran pertahanan merupakan anggaran publik yang dialokasikan untuk segala macam keperluan berkaitan dengan pertahanan suatu negara dan bangsa. Besarannya sangat terkait dengan kemampuan suatu negara dan skala prioritas dalam pembangunan. Menurut Departemen Pertahanan, anggaran diartikan sebagai: “Suatu rencana pekerjaan keuangan yang disusun secara sistematis, yang meliputi jumlah pengeluaran maksimal yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan negara dalam jangka waktu tertentu dan perkiraan

pendapatan (penerimaan) yang mungkin dapat diterima dalam masa tersebut.”.

Pengaruh pengeluaran pertahanan, menurut kenyataannya, memberikan efek yang bervariasi pada setiap negara ketika berhadapan dengan perekonomian. Dari penelitian-penelitian para ekonom, tidak terdapat pendapat yang meyakinkan dari uji empiris yang telah dilakukan dalam melihat pengaruh pengeluaran pertahanan dengan pertumbuhan ekonomi. Berikut ini dipaparkan saluran-saluran apa saja yang mempengaruhi perekonomian dengan adanya pengeluaran pertahanan, khususnya dampak pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Serta dilihat efek-efek apa yang ditimbulkan jika dilakukan perubahan pengeluaran pertahanan.

5.2 Saluran-Saluran (*Channels*) yang Menghubungkan Pengeluaran Pertahanan dengan Perekonomian

Saluran yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian khususnya pertumbuhan ekonomi adalah melalui kebijakan fiskal. Negara dapat berperan melalui pendanaan investasi secara langsung melalui penyediaan pelayanan publik secara efisien sehingga mendorong kegiatan perekonomian, serta merangsang adanya investasi jangka panjang. Pengeluaran pertahanan, salah satu kebijakan pemerintah, dikehendaki berpengaruh positif terhadap perekonomian. Brasoveanu (2010) menjelaskan bentuk saluran atau *channel* dalam perekonomian yang dipengaruhi oleh

pengeluaran pertahanan. Saluran-saluran tersebut diantaranya adalah:

1. Penelitian dan pengembangan pada sektor pertahanan. Penelitian dan pengembangan pada sektor pertahanan dapat memberikan pengaruh positif melalui eksternalitas pada sektor perekonomian dari swasta. Penelitian militer dan pengeluaran pertahanan dapat merangsang inovasi-inovasi dalam bidang teknologi. Pada negara-negara berkembang pertahanan dapat membantu dalam pembentukan struktur sosio-ekonomi yang mendukung pertumbuhan dengan terlibat dalam penelitian dan pengembangan, penyediaan tenaga-tenaga terlatih, pelatihan dan pendidikan, dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi.
2. Keamanan (*security*). Pengeluaran pertahanan dapat menggerakkan perekonomian karena menyediakan keamanan untuk menjaga kestabilan dalam lingkungan bisnis dan menjaga kondisi yang nyaman untuk menarik investor asing. Adanya keamanan juga menjaga penghormatan hak-hak milik dan dinamisasi pasar sehingga mendorong pertumbuhan dalam sistem global saat ini. Dengan disadari bahwa pengeluaran pertahanan meningkatkan keamanan, maka pertahanan akan menstimulasi pertumbuhan.
3. Permintaan. Pengaruh positif pengeluaran pertahanan dapat terjadi melalui peningkatan permintaan agregat (*Keynesian effect*). Peningkatan permintaan berperan penting dalam meningkatkan kegunaan (*utilization*) dari modal-modal yang belum terpakai (*idle capital*),

mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan keuntungan sehingga mendorong investasi yang lebih tinggi, dimana semuanya itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pertahanan disadari juga sebagai alat kebijakan fiskal sehingga meningkatkan stimulasi permintaan atau menurunkan hambatan permintaan. Pengaruh ini tergantung dari efek pengganda yang terjadi (*multiplier effect*), jika diasumsikan tidak terdapat hubungan timbal balik antara peningkatan pajak dengan pembiayaan untuk pengeluaran pemerintah, dan tidak terjadi efek *crowding out* akibat pengeluaran ini.

4. Tenaga kerja. Pengeluaran pertahanan dapat saja meningkatkan keahlian dari sebagian populasi melalui pelatihan dan pendidikan untuk para anggota militer. Sehingga memberikan efek stimulasi pada pertumbuhan jika dapat menggerakkan perekonomian menuju *full employment*, pembentukan sumber daya manusia, menjaga stabilitas, dan menyediakan infrastruktur.
5. Investasi. Pengeluaran modal dapat memberikan kegunaan yang produktif, seperti kegunaan untuk sektor swasta dari jaringan transportasi yang pada awalnya dibangun untuk keperluan militer. Investasi pada sektor pertahanan menggerakkan eksternalitas positif kepada sektor swasta, seperti pembangunan infrastruktur publik, *spillover* dari teknologi, dan formasi sumber daya manusia.
6. Efek *crowding out*. Pengeluaran militer dapat memberikan efek merugikan pada pertumbuhan ekonomi dengan adanya *crowding out* dengan sektor swasta. Pengeluaran

pertahanan yang besar membentuk distorsi pada alokasi sumber daya dan pemisahan sumber-sumber daya dari aktivitas-aktivitas yang produktif karena adanya akumulasi persenjataan dan peningkatan kekuatan militer. Pengeluaran militer dapat saja merugikan karena berdampak pada investasi, tabungan, sumber daya manusia, dan program-program infrastruktur. Perluasan dan bentuk *crowding out* dari peningkatan pengeluaran pertahanan akan bergantung pada kegunaannya dan bagaimana pembiayaannya.

7. *Opportunity cost*. Untuk menjelaskan hubungan negatif antara pengeluaran militer dan pertumbuhan, perekonomian fokus pada *opportunity cost* dari pengeluaran pertahanan. Pengeluaran militer dapat merintangai pembangunan ekonomi dengan mengurangi tabungan dan alokasi sumber-sumber daya yang tidak pada tempatnya menjauhi penggunaan yang lebih produktif dari sektor publik ataupun sektor swasta. Dalam konteks yang sama, penelitian dan pengembangan pada sektor pertahanan dapat memisahkan penelitian dan pengembangan dari sektor swasta. Pengeluaran pemerintah untuk pertahanan nasional menyimpan potensi *opportunity cost*, karena memungkinkan untuk memperendah output perekonomian dan memperlambat tingkat pertumbuhan *growth domestic product* (GDP).
8. Peningkatan pajak (*increased taxation*). Keterbatasan anggaran pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan dapat saja dibiayai dengan pemotongan pengeluaran publik lainnya, peningkatan pajak,

peningkatan pinjaman ataupun meningkatkan jumlah uang yang beredar. Berbagai cara pembiayaan untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan akan memberikan efek lanjutan, yang dapat memukul balik perekonomian. Pengeluaran pertahanan, jika dibiayai oleh pendapatan dari faktor-faktor produksi yang produktif akan memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika dibiayai oleh pendapatan dari sektor non produktif, dapat saja memberikan pengaruh positif ataupun negatif pada pertumbuhan ekonomi, tergantung dari tingkat pengeluaran pertahanannya.

9. Efisiensi dari alokasi sumber daya. Jika pengeluaran militer tidak dikelola melalui mekanisme pasar, akan cenderung menyebabkan distorsi pada harga-harga relatif. Implementasi kebijakan untuk mendukung program militer dapat saja mengganggu alokasi sumber daya dan pertumbuhan ekonomi.
10. Peningkatan Kekuatan Politik dari Militer. Pengeluaran pertahanan dapat saja bukan berasal dari kebutuhan akan keamanan, tetapi karena *rent seeking* dari industri militer yang kompleks, dan dapat menyebabkan perlombaan senjata atau peperangan yang merusak.

Banyak dari semua efek ini terjadi sekaligus, tergantung dari tingkat kegunaannya dan eksternalitas dari pengeluaran pertahanan serta efektivitas dalam mengatasi ancaman.

5.3 Efek-Efek Pengeluaran Pertahanan terhadap Perekonomian

Melalui pendekatan dari sisi penawaran, saluran yang dapat menjelaskan pengaruh pengeluaran militer terhadap *output* perekonomian adalah melalui ketersediaan faktor-faktor produksi, baik itu tenaga kerja (*labor*), modal (*physical and human capital*), serta teknologi yang secara bersama-sama mempengaruhi output perekonomian potensial.

Teori ini mengasumsikan bahwa *real output* per kapita dan pertumbuhan stok modal (*capital stock*) akan berada pada tingkat yang konstan dalam periode tertentu walau ada terjadi fluktuasi-fluktuasi jangka pendek. Diasumsikan pula peningkatan tenaga kerja (*labor*) dan masukan modal (*capital input*) pada tingkat *steady* akan meningkatkan pula *agregat output*-nya pada sebuah tingkat yang *steady* (Solow, 1970). Maka perubahan dari *agregat output* akan dapat dijelaskan melalui perubahan dalam *capital* dan *labor*-nya.

Salah satu pendekatan yang umumnya digunakan dalam penelitian mengenai hubungan antara pengeluaran pertahanan dan pertumbuhan ekonomi dari sisi penawaran adalah dengan pendekatan fungsi produksi (*production function approach*) dari neoklasik. Yaitu dengan meninjau deskripsi dari sisi penawaran (*supply-side description*) melalui perubahan-perubahan *agregat output* (Uk Heo, 1998).

Akibat adanya pengeluaran pertahanan maka muncul efek-efek dalam perekonomian yang berdampak pada *agreat output*, dapat dijelaskan melalui teori neoklasik (West & Thompson, 1990), yaitu:

- Jika muncul *resource-allocation effect* yang menyebabkan investasi menjadi *crowd-out*, maka akan terjadi penurunan pertumbuhan agregat *output*. Model neoklasik menjelaskan bahwa tingkat pertumbuhan merupakan fungsi dari pertumbuhan modal (*the growth of capital stock*), jadi ketika muncul efek ini, transmisi yang terjadi akan menurunkan pertumbuhan modal dan dilanjutkan dengan menurunnya tingkat pertumbuhan agregat *output*.
- Munculnya *resource-mobilization effect* akan berdampak pada turunnya tabungan dari *household*. Sesuai dengan model neoklasik, tentunya turunnya tabungan akan memperendah pergerakan tingkat pertumbuhan.
- Jika terjadi *spin-off effect* yang menyebabkan peningkatan teknologi, maka sesuai model neoklasik, peningkatan teknologi yang terjadi akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
- Terjadinya *aggregate demand effect* dengan adanya mekanisme pengganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian tidak dapat dijelaskan dalam teori neoklasik. Pada model ini tidak mungkin terjadi, karena sumber-sumber daya perekonomian diasumsikan *full employment*.
- Jika terjadi *debt accumulation effect*, maka produk atau jasa berteknologi tinggi yang dibeli dengan utang luar negeri tanpa melakukan transfer teknologi akan memperendah pertumbuhan teknologi. Dalam model neoklasik, rendahnya pertumbuhan ini karena akses kepada teknologi asing sangat terbatas.

Saluran yang dapat menjelaskan pengaruh pengeluaran militer terhadap *output* perekonomian melalui sisi permintaan adalah melalui level dan komposisi dari *expenditure*. Yang terjadi di sini adalah adanya efek pengganda sehingga meningkatkan permintaan (*Keynesian multiplier effect*). Peningkatan ini akan meningkatkan utilitas dan mengurangi tingkat pengangguran. Menurut Benoit (1973, 1978) pengeluaran untuk militer dapat memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi.

Dalam mengelola pengeluaran pertahanan harus ditinjau dari mana pendanaan itu berasal, dan juga dampaknya. Akibat adanya pengeluaran pertahanan maka muncul efek-efek dalam perekonomian yang berdampak pada *output* agregat, yang dapat dijelaskan melalui pendekatan teori Keynes (West & Thompson, 1990), yaitu:

- Jika muncul *resource-allocation effect* akan menyebabkan investasi menjadi *crowd-out*. Model Keynes menjelaskan bahwa pertumbuhan melambat pada tahun-tahun selanjutnya. Misalnya jika sektor pertanian melambat di belakang sektor industri karena pengeluaran militer menekan investasi pada pertanian, tingkat pertumbuhan juga akan melambat.
- Munculnya *resource-mobilization effect* akan berdampak pada turunnya tabungan dari *household*. Menurut model Keynes, rendahnya tingkat rasio tabungan menjadi sebab rendahnya pergerakan tingkat pertumbuhan.
- Jika terdapat *spin-off* yang positif dari pengeluaran militer, sesuai model Keynes, akan terjadi peningkatan pertumbuhan.

- *Aggregate demand effect* yang muncul, tentunya dapat dijelaskan oleh model Keynes berdasarkan mekanisme pengganda (*multiplier mechanism*). Efek multiplier ini statis, tetapi dapat saja berefek dinamis dalam jangka panjang.
- Jika terjadi *debt accumulation effect* akan menekan pertumbuhan modal. Dalam model Keynes, efek ini mengakibatkan pengurangan sumber-sumber daya untuk pertukaran dengan luar negeri.

Hartley (2005) mengidentifikasi pengaruh positif dari pengeluaran pertahanan. Pada periode dimana tingkat pengangguran tinggi, pengeluaran pertahanan dapat memberikan efek stimulasi. Pertahanan memberikan keuntungan secara langsung dari teknologi dan efek ikutannya (*direct technology effect and spinn-off*), dimana *spin-off*-nya digunakan oleh sektor sipil yang dapat meningkatkan pertumbuhan. Pada negara-negara berkembang, pengeluaran pertahanan dapat meningkatkan pertumbuhan jika beberapa bagian pengeluaran digunakan untuk penyediaan infrastruktur sosial. Pengeluaran pertahanan menyediakan perlindungan bagi warga negara, dimana keamanan internal dan eksternal akan meningkatkan pertukaran dalam pasar. Pada negara-negara berkembang pengeluaran pertahanan membantu membangun dan mendukung sumber daya manusia.

Custers (2009) menyebutkan bahwa dalam keperluan penelitian, militer dengan pendekatan Keynesian dapat mengambil beberapa bentuk, yaitu:

- Penggunaan pengeluaran militer sebagai pompa utama dan usaha untuk menghasilkan efek pengganda secara

jangka panjang melalui pengeluaran yang diberikan. Pemerintah dapat memilih menyetujui pembelian pesawat-pesawat tempur, kapal-kapal perang dan keperluan-keperluan perang pada saat suasana resesi. Alternatif lain, pemerintah dapat juga menyetujui pembelian pesawat-pesawat tempur, kapal-kapal perang dan keperluan-keperluan perang melalui tahun-tahun dari siklus bisnis yang telah ditentukan. Dikarenakan pembangunan sistem persenjataan besar membutuhkan perencanaan yang luas, negara-negara kapitalis pada umumnya lebih mengandalkan pembelian-pembelian persenjataan atau alokasi militer untuk pembentukan kebijakan dan aturan ekonomi secara makro dalam jangka panjang.

- Selain secara prinsip alokasi-alokasi militer digunakan untuk menggerakkan siklus bisnis, bentuk lainnya adalah negara menggunakan mekanisme pengganda dalam rangka menstimulasi tambahan permintaan agregat masyarakat pada saat keadaan ekonomi belum penuh (*full capacity*).
- Selain itu disadari, ekonomi kapitalis modern sekarang ini bukanlah merupakan sistem tertutup tetapi juga bergantung pada perdagangan asing dan ekspor jika terdapat surplus dalam perekonomian. Hal ini juga berlaku bagi sektor militer. Suatu negara yang melakukan ekspor senjata, tentunya juga membutuhkan barang-barang impor bagi industrinya dari negara lain, sehingga membentuk efek pengganda juga. Jadi militer Keynesian selain

memberikan efek pengganda bagi domestik juga bagi eksternalnya.

Namun demikian pemerintah harus memajemen pengeluaran pertahanan ini karena ada potensi terjadinya *crowding out* dengan investasi. Benoit (1978) menuturkan, untuk negara berkembang pertumbuhan dari pengeluaran pemerintah untuk pertahanan sangat kecil sekali, sehingga berpengaruh kecil juga terhadap produktivitas investasi. Maka sebenarnya mengurangi pengeluaran untuk militer tidak akan mempengaruhi secara signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.

MOTIVASI NEGARA DALAM MENENTUKAN BESARAN ANGGARAN PERTAHANAN

6.1 Tiga Hipotesis

Castillo et.all (2001) merangkum berbagai pendapat ahli yang memfokuskan pada tiga hipotesis mengapa suatu negara meningkatkan pengeluaran pertahanannya, yaitu:

1. Pengeluaran pertahanan dari suatu negara bergantung pada tingkat keamanannya. Semakin besar tingkat ancaman eksternal yang dirasakan oleh penentu kebijakan, akan semakin besar pula pengeluaran pertahanan dari suatu negara. Negara merasa khawatir, dan mereka akan meningkatkan pengeluaran militernya untuk merespon ancaman tersebut. Hipotesis ini disebut juga *fear hypothesis*.
2. Negara berambisi, melalui pertumbuhan ekonominya yang tinggi, negara bertujuan untuk berpengaruh di dunia internasional dengan memperbesar pengeluaran pertahanannya. Semakin besar kekayaan ekonomi suatu negara, semakin besar pengeluaran pertahanannya. Hipotesis ini disebut juga *ambition hypothesis*.
3. Pemimpin-pemimpin pemerintahan menggunakan kebijakan internasionalnya untuk mengalihkan masalah-

masalah dalam negerinya. Ketika pemerintah merasa memiliki potensi untuk kehilangan legitimasinya, mereka akan melakukan sebuah kebijakan luar negeri yang ekspansif dan meningkatkan pengeluaran pertahanannya. Negara akan menggunakan kebijakan internasional yang agresif dengan peningkatan yang sangat tinggi dalam pengeluaran militernya, untuk mengalihkan masalah-masalah dalam negerinya. Hipotesis ini disebut juga *legitimacy hypothesis*.

6.2 *Fear Hypothesis*

Fear hypothesis menurut Castillo et.al (2001) memiliki lima asumsi. Pertama, dalam sistem internasional tidak terdapat otoritas sentral yang dapat menyelesaikan permasalahan secara kuat diantara seluruh negara. Dalam prakteknya, hal ini akan menghalangi keinginan politik yang kuat dari negara untuk menjaga perdamaian, atau berubah berperilaku untuk melindungi dirinya sendiri dari negara-negara tetangga yang agresif. Kedua, suatu negara tidak merasa yakin tidak mendapat tekanan dari negara lain. Penentu kebijakan akan sulit mengetahui apakah negara-negara lain bertujuan baik atau tidak. Ketiga, semua negara menyiapkan berbagai bentuk kemampuan militer untuk menjaga terjadinya konflik terhadap negara tetangganya.

Asumsi keempat, negara memiliki cukup persenjataan yang *offensive* untuk membahayakan negara lainnya. Asumsi terakhir adalah bahwa kebijakan luar negeri dari negara, tidaklah dikarenakan untuk meningkatkan kekuatan, tetapi berdasarkan

motivasi untuk mampu bertahan (*a search for survival*). Pengeluaran militer, karena itu, merupakan fungsi dari rasa ketidakamanan suatu negara (*state's insecurity*). Semakin tinggi tingkat ancaman terhadap keamanan suatu negara, semakin tinggi pula pengeluaran pertahanannya.

Kesemua asumsi ini setelah dianalisa memiliki pola perilaku yang hampir sama antar negara. Dalam merespon tidak terdapatnya otoritas yang tersentralisasi dalam politik internasiobal, negara-negara membentuk *self-help standard* sendiri. Karena tidak terdapat pemerintah yang berdiri di atas pemerintahan lainnya, pemerintah harus memastikan dirinya sendiri untuk memiliki kekuatan yang mampu melindungi keamanannya. Terlebih tanpa adanya perlindungan dari otoritas yang lebih tinggi, dan tanpa mengetahui kepastian dari tekanan negara-negara tetangga, negara harus meningkatkan kekuatan relatifnya (*relative power*).

Negara-negara akan saling cemburu terhadap keseimbangan kekuatan (*the balance of power*) dari para anggota, dan selalu memata-matai negara lain melalui sistem internasional akan kemampuan ekonomi dan militernya. Kekuatan diperhitungkan secara relatif melalui kebijakan luar negeri dan pengeluaran pertahanannya. Penentu kebijakan memutuskan pada tingkatan yang tepat kebijakan keamanan (*security policy*) dengan mengestimasi tingkat ancaman dari negara-negara lain.

Menurut hipotesis ini, negara yang merasa terancam oleh negara tetangganya akan menentukan proporsi lebih besar untuk anggaran pertahanannya dari anggaran nasionalnya, daripada negara-negara lebih kaya yang lebih memiliki keyakinan

terhadap keamanannya. Negara-negara kaya yang memiliki lebih banyak sumber daya biasanya akan membagi proporsi anggarannya secara adil. Jika hipotesis ini terpenuhi, dapatlah dilihat reaksi dari negara yang merasa terancam akan meningkatkan pengeluaran pertahanannya.

6.3 *Ambition Hypothesis*

Ambition hypothesis memiliki tiga kesamaan dari lima asumsi *fear hypothesis*. Kedua-duanya mengasumsikan negara merupakan unit politik yang paling penting dalam sistem internasional. Terdapat ketidakpastian akan adanya tekanan dari negara-negara. Selain itu negara memiliki cukup persenjataan yang *offensive* untuk membahayakan negara lainnya. Berbeda dengan *fear hypothesis*, dimana secara absolut, bukan relatif, kekuatan ditunjukkan melalui kebijakan luar negeri dan pengeluaran pertahanannya.

Asumsi *ambition hypothesis* yang lain mengenai politik internasional, menurut Castillo et.all (2001) adalah:

- Mengejar peningkatan ekonomi dan kekuatan militer merupakan tujuan yang paling tinggi dari negara. Di sini kekuatan merupakan kemampuan material dari negara.
- Kekayaan suatu negara membentuk tujuan kebijakan luar negerinya. Semakin besar kemampuan ekonomi suatu negara, akan semakin besar ambisi dari kebijakan luar negerinya.

Melalui asumsi-asumsi ini, maka dapat disimpulkan perilaku-perilaku antar negara. Dalam lingkungan internasional yang anarki, dimana tidak terdapat satu pemegang kekuatan

yang dominan, negara-negara akan mengikuti prinsip-prinsip menolong diri sendiri (*the principal of selfhelp*). Kondisi ini memaksa negara untuk melindungi kepentingan-kepentingan mereka. Dengan demikian, negara-negara akan mencari peluang untuk memaksimalkan secara relatif ekonomi dan kekuatan militer mereka. Keduanya, ekonomi dan militer, berjalan di bawah sistem anarki dengan keinginan yang lebih besar bagi negara untuk mendominasi, dengan mengejar kekuasaan yang lebih besar. Dan, ketika saat negara meningkatkan posisinya di hadapan negara-negara tetangganya, tentunya mereka akan merasa terancam.

Akhirnya, ketika negara memiliki keinginan yang sangat besar akan kekuasaan, kebijakan luar negeri mereka sering merefleksikan secara sadar dengan perhitungan manfaat dan biaya dalam tindakan untuk mempertinggi posisi internasional mereka. Negara akan mencoba mengubah sistem internasional untuk kepentingan dengan mengubah perjanjian-perjanjian internasional yang telah ada, seperti menggambar ulang bidang perbatasan dengan pengaruhnya, dan memperluas wilayahnya ketika diperhitungkan lebih besar manfaat dari biayanya. Negara akan terus memperluas kebijakan luar negerinya sebesar kekuatan yang dimilikinya.

Pertumbuhan ekonomi akan cenderung meningkatkan kemampuan menggali dari pemerintah melalui pajak dan kepemilikan negara atau mengontrol sumber daya secara berlebihan. Sumber daya yang lebih besar mampu meningkatkan ambisi luar negeri lebih tinggi lagi, yang diterjemahkan dengan meningkatkan pengeluaran militernya. Tetapi pertumbuhan ekonomi juga cenderung meningkatkan sentralisasi dari

pemerintahan, yang menjadikan peningkatan kekuasaan dari negara, sehingga juga meningkatkan ambisi luar negeri lebih tinggi lagi dengan meningkatkan pengeluaran militernya.

6.4 *Legitimation Hypothesis*

Hipotesis ini berisi bahwa ketika pemerintah mengalami pengikisan kepercayaan dalam negerinya (*domestic legitimation*), mereka mengadopsi kebijakan luar negeri yang eskpansionis dan meningkatkan pengeluaran militernya. Rejim melihat bahwa ekspansi tersebut sebagai instrument untuk mengalihkan perhatian dari kebobrokan dalam negerinya dan memperpanjang legitimasi dari pemerintahannya. Kebijakan ekspansi tersebut dapat berupa pembangunan militer yang besar, diplomasi berdasarkan pemaksaan, dan perluasan teritori dengan kekuatan.

Beberapa asumsi diketengahkan untuk hipotesis ini yang dipinjam dari Simmel (1955) dan Snyder (1991), yaitu (Castillo et.all, 2001):

1. Pertama, tujuan paling penting dari pemerintah adalah mengelola kekuatan politiknya (*political power*). Pemimpin-peminpin politik menyadari bahwa kesinambungan dari rejim mereka tergantung dari kepercayaan yang mereka miliki (*legitimacy*). Pemerintah-pemerintah yang kehilangan kepercayaan dalam mengelola pemerintahannya menghadapi kemungkinan kehilangan kekuasaannya lebih besar. Sedangkan mempertahankan kekuasaan merupakan preferensi pertama dari para pemimpin negara.

2. Kedua, kepentingan-kepentingan golongan di negara yang mengambil kebijakan luar negeri sebagai keuntungan. Berbagai faksi-faksi sosial yang berbeda mempengaruhi negara mereka dalam perdagangan internasional langsung, pengiriman tentara dan kekuatan persenjataan, atau dalam membentuk komintmen bersama.
3. Ketiga, pengambil kebijakan menyadari bahwa adanya ancaman dari keduanya, domestik dan internasional, terhadap mereka ketika mengambil keputusan yang tepat mengenai kebijakan luar negeri. Kadangkala, misalnya dua negara yang melakukan persaingan pengaruh dengan negara lain, tetap sepakat tidak saling menyerang atau mengganggu kedamaian dalam negerinya masing-masing.

Dalam *legitimacy hypothesis* ini, pertumbuhan ekonomi berdampak pada pengeluaran militer sejauh tingkat legitimasi dari pemerintah. Jika terdapat pendapat bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung meningkatkan legitimasi, maka dilaksanakan dengan meningkatkan pelayanan-pelayanan sosial. Hal ini akan menyebabkan bahwa *legitimacy hypothesis* ini justru memberikan hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran militer.

7.1 Pendahuluan

Dimasa lalu, *issue* keamanan tradisional cukup menonjol, yakni yang berhubungan dengan geopolitik dan geostrategi khususnya pengaruh kekuatan blok Barat dan blok Timur. Pada masa itu kekhawatiran dunia terutama pada masalah pengembangan kekuatan militer dan senjata strategis serta hegemoni. Issue keamanan pada dekade terakhir ini makin kompleks dengan meningkatnya terorisme, perompakan dan pembajakan, penyelundupan, imigrasi gelap, penangkapan ikan secara illegal, dan kejahatan lintas negara lainnya. Bentuk-bentuk kejahatan tersebut makin kompleks karena dikendalikan oleh aktor-aktor dengan jaringan lintas negara yang sangat rapi, serta memiliki kemampuan teknologi dan dukungan finansial.

Berakhirnya perang dingin telah merubah tatanan kehidupan bangsa-bangsa didunia secara universal. Telah terjadi perubahan politik dunia. Perubahan politik dunia yang terjadi di era globalisasi, telah menghadirkan suatu kompetisi antar bangsa. Kondisi tersebut cenderung mengarah pada perebutan

³ Disarikan dari Zainal Abidin, Djoko Poernomo, Endang Iryanti, Lukman Arif. Buku Ajar Pendidikan Bela Negara, Universitas Pembangunan Nasional, Veteran Jawa Timur, September 2014.

pengaruh yang cukup ketat, baik global, regional maupun nasional. Perkembangan tersebut antara lain menyebabkan terjadinya perubahan pada situasi keamanan dunia dengan munculnya isu-isu keamanan baru.

Seiring dengan perkembangan global tersebut, di Indonesia berlangsung Gerakan Reformasi, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis, bersih dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejauh ini reformasi nasional telah memberi isyarat perubahan positif dalam tata kehidupan masyarakat Indonesia, melalui penataan sistem pemerintahan, baik politik, hukum, ekonomi, maupun pertahanan serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

Geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan Australia serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, menyebabkan kondisi nasional sangat dipengaruhi oleh kondisi strategis. Mencermati dinamika konteks strategis baik global, regional maupun domestic, maka ancaman yang sangat mungkin dihadapi Indonesia dapat berbentuk ancaman keamanan tradisional maupun ancaman keamanan non-tradisional. Ancaman keamanan tradisional berupa invasi atau agresi militer dari negara lain ke Indonesia diperkirakan kecil kemungkinannya. Peran PBB dan reaksi dunia internasional diyakini mampu mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara untuk memaksakan kehendaknya terhadap negara lain. Ancaman dari luar lebih besar kemungkinan bersumber dari kejahatan terorganisir lintas negara, dengan memanfaatkan kondisi dalam negeri yang tidak kondusif. Perkiraan ancaman dan gangguan yang dihadapi Indonesia meliputi terorisme,

gerakan separatisme, kejahatan lintas negara (penyelundupan, penangkapan ikan illegal, pencemaran dan perusakan ekosistem, imigran gelap, pembajakan/perompakan), aksi radikalisme, konflik komunikasi, dan dampak bencana alam.

7.2 Perubahan Lingkungan Global

Terjadi perubahan lingkungan strategis yang diwarnai berbagai issue politik, ekonomi mempengaruhi aspek keamanan global, regional maupun domestik. Issue politik, ekonomi dan keamanan merupakan aspek-aspek yang saling kait-mengkait dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

- a) Pada lingkup global, berakhirnya perang dingin ternyata tidak menjamin terwujudnya stabilitas keamanan dunia. Dunia masih tetap diwarnai oleh isu-isu keamanan tradisional seperti sengketa perbatasan, perlombaan persenjataan atau proliferasi senjata nuklir dan senjata pemusnah massal. Kompleksitas permasalahan keamanan global makin bertambah dengan adanya praktek-praktek hegemoni yang dikembangkan melalui penguatan aliansi, kemampuan militer, keunggulan teknologi termasuk keunggulan di bidang ekonomi. Disadari bahwa hubungan antar negara yang dibangun atas dasar saling percaya dan menghormati dapat meredam potensi konflik. Namun semakin lebarnya jurang kemampuan antara negara maju dan negara berkembang terutama di bidang ekonomi, teknologi dan militer, dapat menjadi penghalang dalam menjamin hubungan antar bangsa. Dalam kondisi demikian, perlombaan untuk merebut pengaruh melalui

praktek-praktek hegemoni di berbagai bidang tidak jarang menjadi sumber konflik yang dihadapi bangsa-bangsa di dunia. Kekhawatiran dan ketidakpastian yang melanda bangsa-bangsa di dunia menjadi semakin kompleks dengan timbulnya isu keamanan baru yakni keamanan non-tradisional, seperti terorisme, konflik antar etnis, pembajakan di laut atau di udara, kriminalitas lintas negara, antara lain: penyelundupan berbagai komoditi termasuk senjata, obat-obatan terlarang/narkoba, pencurian sumber daya alam (illegal fishing, illegal logging), penyelundupan manusia (trafficking). Peningkatan kriminalitas lintas negara tersebut antara lain didorong oleh adanya jaringan berskala internasional yang didukung dengan kemampuan teknologi dan finansial serta jaringan yang rapi tersebar di sejumlah negara.

- b) Pada lingkup regional, perkembangan dan kecenderungan global merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dinamika keamanan kawasan regional. Kecenderungan yang muncul di kawasan ini adalah terjadinya pergeseran masalah keamanan regional, antara lain berbagai konflik yang menyangkut klaim territorial, jalur komunikasi laut dan jalur perdagangan melalui laut. Isu-isu keamanan nontradisional pada lingkup global, juga menjadi isu utama kawasan regional. Interaksi dan dinamika hubungan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang, Rusia dan Uni Eropa merupakan faktor yang berpengaruh dalam peta keamanan di Asia Pasifik.

c) Pada lingkup domestik, Indonesia sebagai bangsa yang berada ditengah-tengah perkembangan dunia, tidak terlepas dari pengaruh perkembangan global dan regional. Dinamika politik, sosial dan keamanan yang terjadi di kawasan, ikut berpengaruh terhadap perkembangan sosial politik dan keamanan yang terjadi di Indonesia. Isu keamanan domestik yang timbul pada dekade terakhir ini tidak terlepas dari kontribusi faktor-faktor eksternal, baik langsung maupun tidak langsung. Selain faktor eksternal, terdapat pula sejumlah faktor internal yang berpotensi stabilitas keamanan nasional. Faktor-faktor tersebut antara lain, dampak heterogenitas suku bangsa Indonesia, situasi ekonomi yang menyebabkan beban hidup semakin berat, serta faktor politik dan sosial. Akumulasi faktor eksternal dan internal tersebut kemudian muncul dalam berbagai bentuk ancaman dan gangguan terhadap keamanan nasional, dan dapat mengganggu stabilitas kawasan.

7.3 Perkembangan Global, Regional dan Nasional

Dalam membahas perkiraan ancaman terutama ancaman non-militer, harus kita waspadai perkembangan Global, Regional dan Kondisi Nasional. Perkembangan-perkembangan tersebut langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perikehidupan masyarakat Indonesia yang berpotensi menjadi ancaman terhadap kedaulatan NKRI, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

a. Perkembangan Global

Globalisasi serta kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi khususnya di bidang Informasi, komunikasi dan transportasi telah merubah tatanan kehidupan masyarakat dunia. Batas pergaulan antar masyarakat dunia menjadi semakin tidak terbatas (*borderless*). Batas antar negara seakan-akan menjadi “kabur” dan informasi dapat dengan cepat merebak keseluruh penjuru dunia serta seluruh lapisan masyarakat. Pada tatanan hubungan antar bangsa telah terjadi perubahan yang cukup fundamental yang ditandai dengan perubahan suasana lingkungan strategis yakni adanya perkembangan tata nilai universal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Pemahaman Demokratisasi, HAM, Lingkungan Hidup yang salah langkah serta Pasar Bebas, juga adanya paham radikalisme dan terorisme telah merubah tatanan kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Kondisi tersebut berpengaruh pada bidang sosial, budaya, iptek, ideologi, politik, ekonomi dan juga pertahanan keamanan.yang tidak mungkin untuk dihindari.

b. Perkembangan Regional

Globalisasi yang terus berkembang mempengaruhi kondisi regional. Salah satu respon yang muncul adalah penguatan regional di berbagai bidang seperti yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara yang tergabung dalam Piagam ASEAN masingmasing mengharapkan dapat memperoleh manfaat untuk memajukan negaranya melalui pelaksanaan Piagam ASEAN. Sehingga hubungan antar negara anggota termasuk hubungan masyarakatnya akan semakin berkembang dan terbuka luas diberbagai aspek kehidupan

terutama di bidang ekonomi dan sosial-budaya. Interaksi kehidupan masyarakat akan semakin kuat sehingga akan terjadi perubahan kultur sesuai dengan intensitas kehidupan dimana pengaruh negara-negara yang lebih maju akan lebih kuat. Sejalan dengan perkembangan tersebut maka mobilitas masyarakat akan semakin tinggi sehingga batas-batas negara anggota semakin kabur. Dalam kondisi ini akan sangat mungkin terjadi kegiatan-kegiatan yang bersifat illegal yang dilakukan oleh oknum / kelompok tertentu untuk tujuan tertentu sehingga dapat merugikan bangsa dan negara.

c. Kondisi Nasional

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar yang didiami oleh lebih dari 300 suku bangsa membentuk kondisi yang sangat majemuk. Kondisi heterogen tersebut berimplikasi pula terhadap kategorisasi issue-issue keamanan sesuai dengan besarnya untuk dikelompokkan dalam issue keamanan nasional, provinsial atau lokal. Situasi dan kondisi nasional yang berkembang, disamping dipengaruhi oleh perkembangan secara global maupun regional, pada kenyataannya nampak pada segenap aspek/gatra kehidupan bangsa, baik dalam gatra alamiah maupun gatra sosial.

1) Aspek/Gatra Geografi

Posisi Indonesia dipersimpangan antara dua benua dan dua samodra sangat strategis untuk kepentingan lalu lintas perekonomian dunia. Namun juga menimbulkan kerawanan akan timbulnya disintegrasi bangsa. Ribuan pulau yang dihubungkan oleh laut memiliki karakteristik yang berbeda-beda

menyebabkan munculnya kerawanan sosial yang disebabkan oleh perbedaan daerah yang misalnya daerah yang kaya dengan sumber alamnya dengan daerah yang tidak memiliki kekayaan alam, dimana sumber kehidupan sehari-hari hanya dari subsidi pemerintah dan daerah lain atau tergantung dari daerah lain. Daerah yang yang berpotensi memisahkan diri adalah yang paling jauh dari ibukota. Atau daerah yang besar pengaruhnya dari negara tetangga atau daerah perbatasan

2) Aspek/Gatra Demografi

Jumlah penduduk yang besar dengan penyebaran tidak merata, kualitas SDM yang rendah, sempitnya lahan pertanian mengakibatkan semakin tingginya kemiskinan karena rendahnya tingkat pendapatan, ditambah lagi mutu pendidikan yang rendah menyebabkan sulitnya kemampuan bersaing dan dapat dengan mudah dipengaruhi oleh tokoh elit politik / intelektual untuk mendukung kepentingan pribadi atau golongan.

3) Aspek/Gatra Kekayaan Alam

Kekayaan alam Indonesia yang melimpah baik hayati maupun non hayati tetap menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain. Walaupun belum keseluruhan dapat digali dan dikembangkan secara optimal, namun potensi ini perlu didayagunakan dan dipelihara sebaik-baiknya untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat dalam peran sertanya secara berkeadilan guna mendukung kepentingan nasional. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah dan penyebarannya yang tidak merata dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya

dis-integrasi bangsa, karena masalah ini meliputi hal-hal seperti pengelolaan, pembagian bagi hasil, pembinaan apabila terjadi kerusakan dari pengelolaan.

4) Aspek/Gatra Ideologi

Pancasila yang merupakan dasar negara dan alat pemersatu bangsa Indonesia dalam penghayatan dan pengamalannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Bahkan saat ini sering diperdebatkan. Ideologi Pancasila cenderung tergugah dengan adanya kelompokkelompok tertentu yang mengedepankan paham liberal atau kebebasan tanpa batas. Demikian pula paham keagamaan yang bersifat ekstrim kiri atau kanan. Gerakangerakan kelompok radikal merupakan salah satu ancaman nyata. Motif yang melatarbelakangi gerakan-gerakan tersebut dapat berupa dalih agama, etnik, atau kepentingan rakyat. Pada saat ini terdapat oknum atau kelompok radikal yang menggunakan atribut keagamaan berusaha mendirikan negara dengan ideologi lain. Bila kondisi ini tidak ditangani dengan bijaksana pada akhirnya dapat menimbulkan kemungkinan dis-integrasi bangsa.

5) Aspek/Gatra Politik

Ancaman berdimensi politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri ancaman berdimensi politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi atau blokade politik merupakan bentuk-bentuk ancaman nir-militer yang berdimensi politik sering digunakan

oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Menggunakan issue global sebagai kendaraan untuk menekan Indonesia. Pelaksanaan HAM, demokratisasi, penanganan lingkungan hidup serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel selalu menjadi komoditas politik bagi masyarakat internasional untuk mengintervensi suatu negara. Ancaman berdimensi politik dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa. Atau dengan cara menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah.

Ancaman separatisme juga merupakan bentuk ancaman politik di dalam negeri. Hal lain yang juga menonjol adalah timbulnya penguatan identitas lokal sebagai respon masyarakat dalam menyikapi pemberlakuan Otonomi Daerah. Penguatan identitas lokal banyak dimunculkan dalam kemasan issue putra daerah, hak adat, dan hak ulayat. Kondisi yang berkembang sangat kontraproduktif dengan prinsip bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika. Penguatan identitas lokal yang tidak terkelola dengan baik berpotensi menyulut konflik horisontal yang berdimensi suku, agama, ras dan antar golongan serta antar kepentingan.

6) Aspek/Gatra Ekonomi

Perekonomian tidak saja menjadi alat stabilitas dalam negeri, tetapi juga merupakan salah satu alat penentu posisi tawar setiap negara dalam hubungan antar negara atau pergaulan internasional. Negara yang kondisi perekonomiannya lemah menghadapi kesulitan dalam berhubungan dengan negara lain yang posisi perekonomiannya lebih kuat. Ancaman yang

berdimensi ekonomi dikelompokkan jadi dua yaitu internal dan eksternal. Indonesia hadapi ancaman internal berupa inflasi, pengangguran yang tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, penetapan sistem ekonomi yang belum jelas. Eksternal berbentuk indikator kinerja ekonomi yang buruk, daya saing lemah, ketidaksiapan hadapi era globalisasi (pasar bebas) dan tingkat ketergantungan yang tinggi.

7) Aspek/Gatra Sosial Budaya

Ancaman yang berdimensi sosial budaya dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Yang dari dalam didorong oleh issue-issue kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan ketidakadilan. Hal tersebut menjadi awal timbulnya permasalahan separatisme, terorisme, kekerasan yang berakar berurat berkembang, dan bencana akibat perbuatan manusia. Masalah ini lama kelamaan menjadi “kuman penyakit” yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Watak kekerasan yang melekat dan berurat berakar berkembang seperti api dalam sekam yang menjadi pendorong konflik horisontal antar masyarakat atau konflik vertikal antara pemerintah pusat dengan daerah.

Pertumbuhan penduduk yang terus berlangsung tidak seimbang dengan daya dukung dan kondisi lingkungan hidup yang terus menurun. Bersamaan dengan itu merebak berbagai wabah penyakit pandemik (flu burung, demam berdarah, HIV/AIDS). Ancaman dari luar timbul bersamaan dengan dinamika yang terjadi dalam globalisasi. Penetrasi nilai-nilai budaya dari luar negeri sulit dibendung dan berpengaruh pada nilai-nilai di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi

mengakibatkan dunia menjadi kampung global yang interaksi antar masyarakat berlangsung dalam waktu yang aktua. Tidak hanya terjadi transfer informasi, tetapi juga transformasi dan sublimasi nilai-nilai luar secara serta merta sulit dikontrol. Akibatnya terjadi benturan peradaban yang lambat laun nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa semakin rapuh oleh nilai-nilai individualisme. Juga terjadi konflik vertikal antar pemerintah pusat dengan daerah, maupun konflik horisontal yang berdimensi etnoreligius masih menunjukkan potensi yang harus diperhitungkan. Bentuk-bentuk ancaman social budaya tersebut bila tidak dapat ditangani dengan cepat dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

8) Aspek/Gatra Pertahanan dan Keamanan

Bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara yang terjadi saat ini menjadi bersifat multidimensional yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan komunikasi. Demikian pula sarana dan prasarana pendukung didalam pengamanan bentuk ancaman yang bersifat multidimensi yang bersumber dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya. Adanya ketidaksamaan persepsi tentang ancaman pertahanan dan keamanan dapat menimbulkan tidak efektifnya penanganan ancaman yang muncul sehingga cenderung dapat mengganggu stabilitas nasional.

8.1 Hakikat Ancaman

a. Pengertian Ancaman

Pengertian sederhana dari “ancaman” adalah niat, pernyataan, situasi, kondisi, tindakan atau perbuatan yang diperkirakan membahayakan atau merugikan. Bila dikaitkan dengan upaya pembelaan negara, maka pengertian ancaman adalah: setiap usaha atau kegiatan baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri langsung atau tidak langsung yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Bentuk ancaman yang harus dihadapi dan ditanggulangi dengan upaya bela negara dapat berupa ancaman militer dan ancaman non militer.

b. Perkiraan Ancaman

Geopolitik Indonesia sebagai negara yang terletak diantara benua Asia dan Australia serta Samodra Pasifik dan Samodra Hindia, menyebabkan kondisi nasional sangat dipengaruhi oleh perkembangan konteks strategis. Posisi seperti ini berimplikasi pada terjalinnya silang hubungan antara kepentingan negara-

⁴ Disarikan dari Zainal Abidin, Djoko Poernomo, Endang Iryanti, Lukman Arif. Buku Ajar Pendidikan Bela Negara, Universitas Pembangunan Nasional, Veteran Jawa Timur, September 2014.

negara lain dengan kepentingan nasional Indonesia. Mencermati dinamika konteks strategis baik global, regional maupun domestik, maka ancaman yang sangat mungkin dihadapi Indonesia ke depan, dapat berbentuk ancaman keamanan tradisional dan ancaman non-tradisional. Ancaman tradisional atau agresi militer dari negara lain terhadap Indonesia diperkirakan kecil kemungkinannya. Peran PBB dan reaksi dunia internasional diyakini mampu mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara untuk memaksakan kehendaknya terhadap negara lain.

Ancaman dari luar lebih besar kemungkinannya bersumber dari kejahatan terorganisir lintas negara (international crime) yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara, dengan memanfaatkan kondisi dalam negeri yang tidak kondusif. Perkiraan ancaman dan gangguan yang dihadapi Indonesia ke depan meliputi terorisme, gerakan separatisme, kejahatan lintas negara (penyelundupan, penangkapan ikan illegal, pencemaran dan perusakan lingkungan/ekosistem, imigrasi gelap, pembajakan/ perompakan), aksi radikalisme, konflik komunal dan dampak bencana alam.

8.2 Ancaman Militer

Ancaman militer memiliki karakter yang beragam, dapat berupa jenis ancaman yang sifatnya terorganisasi dengan menggunakan, yang dinilai mempunyai kemampuan untuk membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat pula

berupa jenis ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara atau ancaman bersenjata yang datangnya dari gerakan kekuatan bersenjata, yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Dalam melaksanakan pertahanan menghadapi ancaman, TNI menerapkan dua jenis operasi yakni Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Operasi Militer untuk Perang (OMP) adalah segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI, untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia, dan/atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih, yang didahului dengan pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional. Dalam menghadapi ancaman dari luar berupa kekuatan militer negara lain, TNI melaksanakan tugas Operasi Militer Perang (OMP). Meskipun perkiraan ancaman tradisional berupa agresi atau invasi negara lain sangat kecil kemungkinannya, namun tidak membuat kesiapsiagaan pertahanan negara menjadi kendor. Dalam konteks ini upaya penyelenggaraan pertahanan negara lebih diarahkan pada upaya preventif guna mencegah dan mengatasi dampak keamanan yang lebih besar melalui kehadiran dan kesiapan kekuatan TNI.

Dalam pelaksanaan TNI mengedepankan menggunakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk:

1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata
2. Mengatasi pemberontakan bersenjata.

3. Mengatasi aksi terorisme.
4. Mengamankan wilayah perbatasan.
5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.
8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.
9. Membantu tugas pemerintah daerah.
10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban yang diatur dalam undang-undang.
11. Membantu pengamanan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan asing yang sedang berada di Indonesia.
12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan.
13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue).
14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap perampokan, pembajakan dan penyelundupan.

TNI melaksanakan OMSP bersama-sama segenap komponen bangsa lain dalam suatu keterpaduan usaha sesuai dengan tingkat eskalasi ancaman yang dihadapi. Terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan, TNI akan senantiasa mengedepankan upaya pencegahan sebagai cara terbaik guna

menghindari korban dan dampak lain yang lebih besar. Penggunaan kekuatan TNI dalam tugas OMSP diarahkan untuk kepentingan pertahanan yang bersifat mendesak. Tugas-tugas mendesak tersebut meliputi mengatasi gerakan separatisme bersenjata, menghadapi pemberontakan bersenjata, mengatasi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, mengamankan prseiden dan wakil presiden beserta keluarganya, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, membantu tugas pemerintah daerah, membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat, membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Insonesia, membantu menanggulangi akibat bencana alam – pengungsian – pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (S.A.R.), membantu poemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap perompakan – pembajakan – penyelundupan.

a. Bentuk Ancaman Militer

Ancaman Militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, sepionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal. Rincian ancaman Militer dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 pada penjelasan pasal 7 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a) Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa atau dalam bentuk dan cara-cara, antara lain:
- 1) Invasi berupa serangan oleh kekuatan bersenjata negara lain, terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 2) Bombardemen berupa penggunaan senjata lainnya yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 3) Blokade terhadap pelabuhan atau pantai atau wilayah udara, Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh angkatan bersenjata negara lain
 - 4) Serangan unsur angkatan bersenjata negara lain terhadap terhadap unsur satuan darat atau satuan laut atau satuan udara Tentara Nasional Indonesia.
 - 5) Unsur kekuatan bersenjata negara lain yang berada dalam wilayah NKRI berdasarkan perjanjian yang tindakan atau keberadaannya bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian.
 - 6) Tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayah oleh negara lain sebagai darah persiapan untuk melakukan agresi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia,
 - 7) Pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran oleh negara lain untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau melakukan tindakan seperti tersebut diatas

- b) Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik yang menggunakan kapal atau pesawat non komersial.
- c) Spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer
- d) Sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan obyek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa.
- e) Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam negara atau terorisme dalam negeri yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.
- f) Pemberotakan bersenjata.
- g) Perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata dengan kelompok masyarakat bersenjata lainnya.

b. Strategi Pertahanan Militer

Dalam penyelenggaraan pertahanan negara, ancaman militer mendapatkan perhatian utama karena berakibat langsung terhadap keadulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Oleh karena itu, dalam menghadapinya diperlukan strategi pertahanan yang efektif untuk dapat melindungi NKRI dengan segala kepentingannya.

Strategi dalam menghadapi ancaman militer disesuaikan dengan sumber, serta bentuk dan besarnya ancaman aktual yang mengancam Indonesia. Upaya menghadapi ancaman agresi, yakni invasi suatu negara terhadap Indonesia dihadapi dengan strategi pertahanan yang mendayagunakan segenap kekuatan

pertahanan secara total dengan mengerahkan Komponen Cadangan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat Komponen Utama serta mengerahkan secara langsung/tidak langsung Komponen Pendukung guna meningkatkan kedua komponen lainnya, karena yang dipertaruhkan adalah hidup atau matinya NKRI. Sebaliknya, dalam menghadapi ancaman militer dengan jenis bukan invasi, penggunaan kekuatan pertahanan negara disesuaikan dengan skala ancaman serta tingkat resiko yang ditimbulkannya.

Sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU.RI.No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai Komponen Utama didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Tugas utama TNI adalah menghadapi ancaman militer yang berbentuk agresi militer yang dilakukan suatu negara dengan tujuan menduduki sebagian atau seluruh wilayah NKRI. Agresi militer ini dihadapi dengan strategi pertahanan berlapis.

Meskipun TNI merupakan Komponen Utama pertahanan negara, namun dalam menghadapi ancaman militer, khususnya agresi militer suatu negara, lapis diplomasi sebagai pertahanan non-militer tetap menjadi lapis pertama untuk mencegah terjadinya perang atau mengurangi dampak perang. Lapis diplomasi diselenggarakan dengan didukung oleh lapis perlawanan tidak bersenjata dan lapis pertahanan militer dengan menyiagakan segenap kekuatan TNI di seluruh Indonesia, bila perlu diperbesar dengan Komponen Cadangan melalui mobilisasi.

Sebagai kelanjutan dan sekaligus memperkuat upaya-upaya diplomasi, lapis perlawanan tidak bersenjata diberdayakan sebesar-besarnya sebagai wujud penolakan bangsa Indonesia terhadap suatu negara yang hendak menyerang Indonesia. Lapis perlawanan tidak bersenjata dalam menghadapi agresi negara dikembangkan melalui usaha-usaha psikologis, seperti unjuk rasa di seluruh wilayah Indonesia untuk menolak kekuatan militer yang hendak menyerang atau menginvasi Indonesia, serta usaha lain untuk membangkitkan nasionalisme bangsa Indonesia. Ancaman militer yang bentuknya bukan agresi militer dihadapi dalam kerangka menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Bentuk ancaman militer yang dimaksud antara lain, adalah pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, pemberontakan bersenjata, gerakan separatis bersenjata, sabotase, spionase, aksi terror bersenjata yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris dalam negeri, ancaman keamanan di alut atau di udara yurisdiksi nasional, dan konflik komunal.

Untuk menghadapi ancaman militer bukan agresi, upaya yang dilaksanakan adalah mengerahkan kekuatan siap nasional yang besarnya disesuaikan dengan besarnya ancaman, dengan pelaksanaannya berdasarkan keputusan politik atau melalui suatu mekanisme atau prosedur tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Strategi pertahanan menghadapi ancaman militer yang bukan agresi dihadapi dengan kekuatan TNI sebagai lapis pertahanan militer, baik secara matra atau secara gabungan dalam suatu susunan Tri Matra Terpadu. Besarnya

kekuatan yang dikerahkan disesuaikan dengan bentuk, derajat, dan besarnya ancaman yang dihadapi.

Dalam melaksanakan pertahanan menghadapi ancaman, TNI menerapkan dua jenis operasi yakni Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

8.3 Ancaman Non-Militer

Ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia diperkirakan lebih besar kemungkinannya berasal dari ancaman non-tradisional, baik yang bersifat lintas negara maupun yang timbul di dalam negeri. Oleh karena itu kebijaksanaan strategis pertahanan Indonesia yang diarahkan untuk menghadapi dan mengatasi ancaman non-tradisional merupakan prioritas dan mendesak.

Ancaman Non Militer pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor nonmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa.

a. Bentuk-bentuk Ancaman Non Militer

Ancaman non militer digolongkan kedalam ancaman yang berdimensi Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, informasi dan teknologi, serta keselamatan umum. Contoh ancaman non militer antara lain the brain war, berupa konflik ideologi, perbedaan keunggulan, persaingan daya cipta dalam pencatatan ekonomi, teknologi dan ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya.

Bentuk-bentuk ancaman non militer dapat digolongkan menjadi 2 (dua):

- a) Pertama, adalah yang berkaitan langsung dengan dengan pertahanan negara, misalnya kesengajaan penyebaran penyakit sebagi bagian dari perang biologi
- b) Kedua, adalah ancaman non militer yang tidak berkaitan langsung dengan pertahanan negara, misalnya penyebaran penyakit secara alamiah, baik epidemik maupun pandemik; contoh lain dari ancaman non mliter golongan ini adalah krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998.

Ancaman non militer yang bentuk ke dua ini merupakan ancaman yang sifatnya tidak secara langsung mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Namun resiko yang ditimbulkan berimplikasi mengganggu stabilitas nasional. Terganggunya stabilitas nasional tidak saja menghambat pembangunan nasional, tetapi lambat-laun dapat berkembang menjadi permasalahan kompleks yang mengancam kredibilitas pemerintah dan eksistensi bangsa. Dengan demikian dalam melihat ancaman non militer berdasarkan eskalasi ancaman mulai dari yang ringan sampai dengan tingkatan yang membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan negara dan bangsa. Untuk menilai ancaman non militer dapat dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat sesuai dengan tingkat eskalasinya.

Sifat ancaman non militer harus dihadapi pula dengan pendekatan non militer, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non militer menempatkan lembaga

pemerintah diluar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa, sedangkan TNI sebagai pendukung.

Dalam era global dewasa ini yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi dan informasi, sebagaimana kita rasakan bersama sekarang. Telah mempengaruhi pola dan bentuk ancaman. Lingkungan strategis, baik global, regional maupun nasional yang dipengaruhi arus globalisasi dewasa ini mengisyaratkan adanya kompleksitas tantangan dan ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ancaman yang semula bersifat fisik (konvensional), yang biasanya dihadapi dengan kekuatan fisik (*hard power*), kini telah berkembang menjadi multidimensional (fisik dan non fisik) dengan dominasi ancaman yang bersifat non fisik, serta berasal dari luar dan dari dalam negeri. Sebuah bentuk peperangan baru yang memanfaatkan perkembangan pesat teknologi informasi, termasuk perkembangan diri bidang *new composite material* seperti kimia dan biologi.

Kecenderungan tersebut sudah barang tentu mempengaruhi karakteristik ancaman dengan munculnya isue-isue keamanan baru, yang diantaranya beraspek maya, dikenal dengan istilah *cyber-war* atau *the brain-war*, seperti perang selisih keunggulan, perang daya cipta dalam percaturan ekonomi, teknologi dan ilmu pengetahuan. Perang juga diawali dengan merubah paradigma berpikir dan selanjutnya dapat berdampak pada aspek lainnya dengan memanfaatkan kelemahan dan celah rentannya kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dapat berpengaruh pada mudarnya energi

kolektif bangsa, bahkan dapat membahayakan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bentuk Perang dalam Era Globalisasi adalah perang informasi, perang ekonomi, perang budaya, perang politik bahkan perang peradaban. Disinilah peran *soft power* (keuatan non militer) menjadi sangat penting dan mengemuka dalam menghadapi ancaman perang modern ini. Namun demikian disisi lain globalisasi juga memberikan dampak positif, antara lain ditandai dengan semakin eratnya hubungan antar bangsa di dunia, yang menciptakan suatu kesaling-tergantungan antar negara-negara se antero dunia. Keeratan hubungan tersebut antara lain akan bermanfaat untuk menyelesaikan masalah global yang perlu ditanggulangi bersama, seperti *energy security, global climate change, terrorist financing (The Real Triple Treaths)*. Disisi lain globalisasi juga berdampak negatif, yang ditandai dengan timbulnya persaingan antar bangsa, sehingga setiap negara dituntut untuk memiliki daya saing dan keunggulan diberbagai bidang kehidupan.

Menghadapi hakekat ancaman yang beragam, dan kompleks tersebut, semakin menguat keyakinan bangsa laindonesia akan sistem pertahanan semesta dalam menghadapi dinamika ancaman sekarang dan kedepan. Implementasi pendekatan konprehensif dan integratif karena pertahanan negara tidak cukup didekati dari aspek militer semata, akan tetapi memerlukan pendekatan terpadu secara non militer dengan pendekatan secara militer, sebagai satu kesatuan pertahanan (*total defence*).

Hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,

bahwa sistem pertahanan negara adalah bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, dan dilaksanakan secara menyeluruh, total dan terpadu. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama, dengan didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Sistem pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman non militer, menempatkan lembaga pemerintah diluar diluar bidang pertahanan, sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa, termasuk mahasiswa, para intelektual Indonesia yang merupakan bagian dari civil society. Bersinergi dengan itu, maka pembangunan pertahanan Indonesia, baik militer maupun non militer juga harus dilaksanakan secara terpadu, sehingga menghasilkan suatu kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang memiliki efek penangkalan yang tinggi dalam menjaga keutuhan dan tetap tegaknya NKRI.

b. Pertahanan Non Militer dan Pembinaannya

Sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non-militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsurunsur lain dari kekuatan bangsa. Substansi dari pasal tersebut merefleksikan bahwa pertahanan negara merupakan fungsi pemerintahan negara yang cakupannya tidak hanya terbatas

pada pertahanan militer, tetapi juga termasuk ke dalam fungsi lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan.

Telah disebut di atas bahwa ancaman non-militer pada dasarnya tidak secara langsung kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Namun pada skala tertentu dapat bereskalasi atau berkembang luas sehingga mengganggu stabilitas nasional, yang pada akhirnya mengancam eksistensi negara. Ancaman non-militer ditangani dengan pendekatan non-militer, sedangkan fungsi pertahanan militer dapat digunakan pada kondisi tertentu sebagai unsur bantuan. Disinilah esensi dari Sistem Pertahanan Semesta yang diwujudkan dengan keterlibatan dengan lembaga pemerintahan di luar bidang pertahanan untuk memerankan fungsi pertahanan sipil dalam penanganan ancaman nonmiliter.

Postur pertahanan non-militer merupakan refleksi dari hasil pembangunan seluruh sumber daya nasional. Unsur-unsur pertahanan non-militer berada dalam lingkup wewenang dan tanggung jawab setiap instansi di luar bidang Kementerian Pertahanan. Oleh karena itu pembangunan postur pertahanan non-militer menjadi tanggung jawab seluruh Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPND), yang pelaksanaannya tertuang dalam sektor masing-masing, serta pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menteri Pertahanan.

Pembinaan pertahanan non-militer dalam rangka menghadapi ancaman non-militer diselenggarakan untuk menyiapkan pembangunan manusia Indonesia yang selaras dengan pembangunan nasional. Dalam rangka itu tiap-tiap Kementerian berkewajiban menyusun kebijakan dan strategi di bidangnya masing-masing. Pembinaan pertahanan non-militer

bertujuan untuk membangun manusia Indonesia yang berkualitas secara utuh dan menyeluruh agar memiliki daya saing di era glogal, serta membina segenap sumber daya nasional untuk mewujudkan Indonesia yang aman, bersatu dan berkesejahteraan.

Pembangunan manusia yang berkualitas dilakukan melalui pendidikan, termasuk di dalamnya Pendidikan Kesadaran Bela Negara. Warga negara yang memiliki kesadaran bela negara dapat diarahkan untuk terwujudnya pertahanan non-militer dalam rangka perwujudan Sistem Pertahanan Semesta. Warga negara yang memiliki kesadaran bela negara dapat mengabdikan dirinya sebagai Komponen Cadangan dan dikembangkan secara bertahap dan berlanjut sampai mencapai kekuatan yang proporsional. Komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat Komponen Utama (TNI) dalam menghadapi ancaman militer, sedangkan Komponen Pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana yang secara langsung atau tidaklangsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan.

c. Pembinaan Kekuatan Pertahanan Non-militer

Pertahanan negara non-militer harus dapat ditempatkan dalam konteks sebagai bentuk diplomasi, pelayanan publik, meningkatkan daya saing dalam ekonomi, memperkuat ikatan sosial budaya, menjaga ketersediaan pasokan energi dan

jaminan beroperasinya sistem distribusinya secara baik, pelabuhan yang aman, bandara yang aman dan efisien, pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta jaminan keamanan sosial. Dari konteks tersebut, jelas bahwa dimensi pertahanan negara tidak saja bersifat fisik yang berorientasi pada pertahanan militer yang mengandalkan kekuatan bersenjata, tetapi semua aspek kehidupan memiliki dimensi pertahanan negara yang dapat disinergikan.

Penyinerjian tersebut tertuang dalam pasal 1 titik 2 UU. RI. No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang berbunyi: Sistem Pertahanan Negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, sumber daya nasional lainnya yang disiapkan secara dini oleh pemerintah an diselenggarakan total, terpadu, terarah dan berlanjut, untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dari segala ancaman”

Sumber daya nasional yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buata, dan saran prasarana nasional dapat didayagunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

Potensi sumber daya nasional adalah segala sumber daya yang dapat didayagunakan melalui proses transformasi menjadi potensi kekuatan pertahanan negara yang pada saatnya diperlukan dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan pertahanan negara. Transformasi dari sumber daya nasional menjadi kekuatan pertahanan negara salah satunya dimaksudkan untuk Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung, dalam

rangka memperkuat dan memperbesar Komponen Utama pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer.

Kesemestaan yang merupakan sifat Sistem Pertahanan Negara (*Total Defence*) dalam konteks pertahanan negara mempunyai dua fungsi, yaitu dalam bentuk Pertahanan Militer (*Military Defence*) dan Petahanan Non-militer (*Non Military Defence*) yang dilaksanakan TNI meliputi fungsi Operasi Militer Perang (OMP/*War*) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP/*Other Then War*). Untuk pertahanan non-militer dibentuk Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung guna memperkuat Komponen Utama, sedangkan Petahanan Sipil (*Civil Defence*) untuk menghadapi ancaman non-militer.

Dalam rangka membangun pertahanan non-militer Kementerian Pertahanan Cq Direktorat Jendral Potensi Pertahanan menyelenggarakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara sebagai bagian dari *psychological defence*. Penyelenggaraannya dikordinasikan dengan Kementerian yang juga menangani pembinaan kesadaran bela negara di masyarakat, di antaranya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Dalam negeri.

9.1 Memperkecil Ancaman Eksternal

Perekonomian nasional dapat berjalan dengan lancar dan mampu ditingkatkan, jika terdapat rasa aman yang dirasakan oleh para pelaku ekonomi dalam melaksanakan segala kegiatannya secara optimal. Untuk itu diberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu adanya pertahanan nasional yang kuat sehingga akan mendorong investasi masuk ke Indonesia tanpa hambatan. Terdapat hubungan antara tingkat keamanan dan tingkat investasi dalam suatu negara. Jika negara terancam akan menyebabkan investor merasa tidak aman dan takut datang ke Indonesia, karena tingkat risiko dan ketidakpastian menjadi semakin tinggi, apalagi terhadap investasi-investasi yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang
2. Dalam kenyataannya, Indonesia belum memiliki anggaran yang cukup untuk mendanai peralatan yang memadai dan berteknologi tinggi, karena itu perlu mempertahankan dan memperkuat sistem pertahanan rakyat semesta dalam menghadapi seluruh ancaman. Hal ini didukung dengan sulitnya dilakukan koordinasi secara sentral dan cepat karena kondisi demografis yang majemuk dan kondisi

geografis Indonesia dengan wilayah kepulauan yang luas. Pemberdayaan pertahanan akan lebih efektif dan efisien bila dilakukan dengan lebih banyak mendorong inisiatif dari masyarakat.

3. Untuk memperkecil *gap* antara kekuatan Indonesia dengan lingkungan strategisnya, pengauditan, penyediaan dan penyempurnaan alat utama sitem persenjataan TNI harus dilakukan dengan konsep-konsep pembangunan pertahanan jangka panjang, kebutuhan akan peralatan baru, alokasi untuk pengadaan persenjataan, penyediaan biaya untuk pemeliharaan dan pembaruan bagi persenjataan, dan lain-lain. Kondisi persenjataan militer negara-negara tetangga harus menjadi salah satu pertimbangan yang sangat penting, mengingat seringnya terjadi gangguan keamanan di wilayah perbatasan.
4. Untuk meningkatkan kemampuan di bidang teknologi, cara berpikir dan kecerdasan kalangan militer terhadap teknologi harus terus menerus dilakukan, khususnya untuk teknologi komunikasi, termasuk komputer, internet, dan pengindraan jauh. Peningkatan kemampuan ini sangat berpengaruh terhadap taktik, operasi, dan strategi, serta cocok dengan medan Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan wilayah perairan yang sangat luas. Dengan kemampuan ini pasukan TNI akan lincah dan dapat tersebar di banyak tempat. Pentingnya penguasaan teknologi ini diperkuat dengan fakta bahwa pengenalan dan penguasaan teknologi oleh negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara sudah lebih maju.

5. Untuk meningkatkan kekuatan pertahanan nasional, program penelitian dan pengembangan pertahanan perlu ditingkatkan dalam menganalisa postur pertahanan yang terbaik dan ancaman potensial yang mungkin muncul beberapa masa ke depan. Kurangnya anggaran dalam penelitian dan pengembangan pertahanan perlu segera diantisipasi melalui perhatian yang lebih besar dan visioner sebagai bagian dari pembinaan pertahanan Indonesia secara jangka panjang.
6. Untuk membantu peningkatan pertahanan nasional, perlu diberdayakan berbagai kelompok sipil untuk berperan dalam bidang pertahanan, misalnya kalangan dunia usaha dan perguruan tinggi. Hal ini akan meringankan beban pemerintah dan memperkuat upaya pemantapan postur pertahanan Indonesia dalam jangka panjang. Kontribusi dunia usaha yang paling relevan adalah dengan kegiatan inovatif melalui penelitian dan pengembangan, serta produksi yang dikaitkan dengan program pengembangan industri pertahanan. Perguruan tinggi memiliki sumber daya manusia dengan keahlian dan kemampuan untuk melakukan penelitian secara terus menerus, berkesinambungan untuk mengembangkan penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, termasuk dalam bidang pengembangan pertahanan nasional.
7. Sudah saatnya dilakukan program-program peningkatan kesejahteraan wilayah perbatasan dengan pemberdayaan masyarakat di sana, serta pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya yang menghubungkan ke wilayah perbatasan, pelabuhan laut dan bandar udara. Dengan

meningkatnya aktivitas di perbatasan akan meningkatkan kontrol masyarakat terhadap gangguan-gangguan keamanan dan penyerobotan wilayah perbatasan.

8. Untuk mengatasi ancaman dan gangguan-gangguan di perbatasan, dalam jangka panjang perlu dibangun pangkalan-pangkalan militer besar yang berhadapan langsung dengan negara-negara tetangga di wilayah terluar Negara Indonesia. Perlu dipusatkan lima pangkalan militer di pulau-pulau terbesar Indonesia agar cepat tanggap terhadap gangguan yang mengancam, yaitu di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Irian Jaya.
9. Pemerintah perlu bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk menjaga perdamaian dan menurunkan ketegangan di lingkungan strategisnya. Peningkatan kerjasama dalam lembaga internasional juga dapat mendukung stabilitas kawasan sehingga hubungan ekonomi antar negara dapat berjalan tanpa hambatan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah pada masing-masing negara. Upaya ini juga membantu penghematan penggunaan anggaran pertahanan yang terbatas.

9.2 Anggaran Pertahanan

Terdapat hubungan antara anggaran pertahanan dengan peningkatan perekonomian. Berdasarkan hal tersebut diberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu meningkatkan perekonomian nasional dengan mendorong peningkatan produksi nasional, karena

terdapat hubungan antara perekonomian dan anggaran pertahanan, maka. Perekonomian nasional yang semakin berkembang dan maju akan meningkatkan kemampuan membayar pajak bagi setiap warga negara sebagai kewajibannya. Dengan demikian diharapkan akan tersedia anggaran pertahanan yang memadai seiring dengan meningkatnya Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara terhadap PDB.

2. Perlunya membuat rencana pembangunan kekuatan pertahanan melalui anggaran yang memadai sehingga dapat menciptakan kemampuan pertahanan yang dapat diandalkan. Program-program anggaran harus dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin agar dana yang disediakan untuk pertahanan negara yang umumnya terbatas dapat memperoleh manfaat maksimal. Hal ini merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya kegiatan ekonomi secara lancar dengan persaingan yang sehat baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Adanya keterbatasan anggaran pemerintah, harus disikapi dengan penyusunan secara seimbang antara keperluan anggaran pertahanan dengan kemampuan penyediaan anggaran lain dalam mendukung perekonomian nasional. Dengan demikian pengelolaan anggaran pertahanan haruslah berdasarkan skala prioritas, adanya kesinambungan alokasi antar periode anggaran, efektifitas dan efisiensi, serta transparansi dalam penggunaan anggaran.
4. Untuk meningkatkan pemanfaatan anggaran pertahanan lebih efektif dan efisien, pemerintah harus bekerja keras

menghilangkan hambatan dari diri sendiri, misalnya dengan meniadakan distorsi dan pemborosan dalam penggunaan keuangan negara, seperti dalam pembelian alutsista.

5. Secara realistis hambatan dukungan pendanaan keuangan negara untuk pertahanan adalah karena kendala kurangnya anggaran pertahanan. Oleh karena itu harus segera dilakukan terobosan kebijakan untuk keluar dari jebakan anggaran ini. Sumber pembiayaan alternatif juga harus dicari, misalnya melalui kontribusi pemerintah daerah yang surplus, pinjaman lunak dan pembelian alutsista dalam negeri.

9.3 Penelitian yang Disarankan

Banyaknya penelitian yang dapat dikembangkan dalam ekonomi pertahanan, seperti:

1. Dikembangkannya model-model ekonomi pertahanan khusus untuk Indonesia dengan asumsi-asumsi yang lebih realistis. Misalnya dengan melakukan studi tersendiri dalam mengkuantifisir ancaman eksternal dan internal yang lebih akurat.
2. Penelitian khusus mengenai industri pertahanan karena semakin penting dalam pemenuhan kebutuhan untuk memperkuat postur pertahanan negara serta memberikan efek positif terhadap perekonomian melalui produksi dan perkembangan teknologinya.
3. Perlu dilakukan penelitian untuk mendalami ancaman internal, khususnya untuk Indonesia. Topik-topik yang

dapat dikembangkan adalah mengenai pemberontakan dan pemisahan diri, konflik horisontal, terorisme, korupsi, hak asasi manusia, kesehatan dan pendidikan, dan lain-lain. Topik-topik ini sangat penting untuk Indonesia sehingga perlu ditelaah secara ilmiah.

4. Terjadinya perkembangan militer di dunia harus disikapi dengan penelitian-penelitian yang lebih komprehensif, misalnya topik-topik mengenai manajemen pertahanan, manajemen anggaran pertahanan kekuatan persenjataan minimal, perlombaan senjata antar negara, keamanan laut dan perbatasan, penyelesaian konflik dan perdamaian, peperangan asimetris, dan sebagainya.



REFERENSI

- Abidin Z., Poernomo D., Iryanti E., Arif L. (2014). *Buku Ajar Pendidikan Bela Negara*. Universitas Pembangunan Nasional, Veteran Jawa Timur, September 2014.
- Anggoro, Kusnanto. (2003). “Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum”. *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 14 Juli 2003
- Bakrie, Connie Rahakundini. (2009). *Defending Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Benoit, E. (1973). *Defence and Economic Growth in Developing Countries*. Lexington.
- Benoit, E. (1978). *Growth and Defence in Developing Countries. Economic Development and Cultural Change*. Vol.26 (2), 271-280.
- Blackwill, R. and Harris, J. M. (2016). *War by other means*. Harvard University Press. Cambridge: Harvard University Press.
- Brasoveanu, Laura Obreja. (2010). “The Impact of Defense Expenditure on Economic Growth”, *Romanian Journal of Economic Forecasting* – 4/2010.

- Buzan, Barry. (1991). *People, States and Fear: an Agenda For International Security Studies in the Post-Cold War Era*. Second Edition. New York: Harvester Wheatsheaf.
- Castillo; Lowell; Tellis; Munoz; Zycher. (2001). *Military Expenditures and Economic Growth*, RAND, prepared for the United States Army, Aroyo Center.
- Chatterjee, Partha. (1972). The Classical Balance of Power Theory. *Journal of Peace Research*, Vol.9 (1), 51-61
- Custers, Peter. (2009). *The Tasks of Keynesianism Today – Green New Deals as Transition Towards a Zero Growth Economy? Questioning Globalized Militarism*.
- Diamond, Jared M. (1999). *Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies*. New York: WW Norton.
- Departemen Pertahanan Indonesia. (2008). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta.
- Fukuyama, F. (2006). *The end of history and the last man*. Reissue ed, Free Press. Reissue ed. Stanford: Free Press
- Golley, J. et al. (2016). *Geoeconomic Brief # 1 — Context and Concepts*. *Australian National University Public Policy and Societal Impact Hub*.
- Hartley & Sandler, Todd. (1995). “Introduction” In *Handbook of Defense Economic Volume 1*. Amsterdam: North Holland.
- Heo, Uk. (1998). Modeling The Defense-Growth Relationship Around The Globe. *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 42, 637-57.
- Hirschman, A. O. (1981). *National Power and the Structure of Foreign Trade*. Expanded, University of California Press.

- Expanded California: University of California Press. doi: 10.2307/3017772.
- Hopkins, Raymond & Mansbach, Richard. (1973). Structure and Proses in International Politics.
- Huntington, S. P. (1993). Why International Primacy Matters, *International Security*, 17(4), 68–83. Available at: <http://www.jstor.org/stable/2539022>.
- Keliat, Makmur. (2010). Ekonomi Pertahanan Indonesia. *Prisma Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi* Vol.29 No.1.
- Kennedy P.S.J., Sutrasna Y., Haetami. (2022). Geo-ekonomi: Dampak Terbentuknya Pakta Trilateral AUKUS terhadap ASEAN. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, Vol 3(2), 108–116. DOI: 10.47065/jbe.v3i2.1689
- Keohane, R. O. and Nye, J. S. (1977). *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. Michigan: Little, Brown.
- Lebovick, James H. & Ishaq, Ashfaq. (1987). Military Burden, Security Needs, and Economic Growth in the Middle East, *The Journal of Conflict Resolution*, Vol.31, No.1, 106-138.
- Luttwak, E. N. (1990). From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce. *The National Interest*, Summer (20), 17–23. Available at: <http://www.jstor.org/stable/42894676>.
- Luttwak, E. N. (1993). *The Endangered American Dream: How to stop the United States from becoming a third-world country and how to win the geo-economic struggle for industrial supremacy*. New York: Simon & Schuster.

- Merriam-Webster (2022) geo-economics noun, *Merriam-Webster Dictionary*. Available at: <https://www.merriamwebster.com/dictionary/geo-economics>
- McGuire. (1995). *Defense Economics and International Security* (hal.16), dalam Hartley & Sandler, *Handbook of Defense Economics*, Volume 1. Iowa: Elsevier Science BV.
- Powell, Robert. (1999). *In the Shadow of Power*. Princenton. N.J: Princenton University Press.
- Richardson, L. (1960). *Arms and Insecurity: A Mathematical Study of the Cause and Origins of War*. Chicago: Quadrangle.
- Sandler, Todd. & Hertley, Keith. (1995). *The Economics of Defence*. *Cambridge surveys of Economic Literature*. UK: Cambridge University Press.
- Scholvin, S. and Wigell, M. (2018). *Geo-Economics As Concept and Practice in International Relations*, *FIIA Working Paper*. Available at: <https://www.researchgate.net/publication/324602603%0A%20Geo-economics>
- Smith, Ron P. (2000). *Defence Expenditure and Economic Growth*. ESRC.
- Solow, Robert M. (1970). *Growth Theory: An Exposition*. New York: Oxford University Press.
- Treverton, Gregory F. & Jones, Seth G. (2005). *Measuring National Power*. Santa Monica: RAND
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Virmani, Arvind. (2004). Economic Performance, Power Potential and Global Governance: Towards a New International Order, *ICRIER Working Paper Series*.
- West, Robert & Thompson, Scott. (1990). *Impact of Military Expenditures on Economic Development*. Interim Synthesis Report Submitted to the Agency for International Development by the Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University.
- Wigell, M. (2016). ‘Conceptualizing regional powers’ geoeconomic strategies: neo-imperialism, neo-mercantilism, hegemony, and liberal institutionalism. *Asia Europe Journal*, 14(2), 135–151. doi: 10.1007/s10308-015-0442-x.
- World Economic Forum. (2016). The Age of Economic Coercion: How Geo-politics is Disrupting Supply Chains, Financial Systems, Energy Markets, Trade and the Internet. *WEF*. Available at: www.weforum.org.
- Yetgin, murat. (1988). Strategic Interactions Between the United States and North Korea: Deterrence or Security Dilemma ? *Army War School*, Ankara, Turkey.